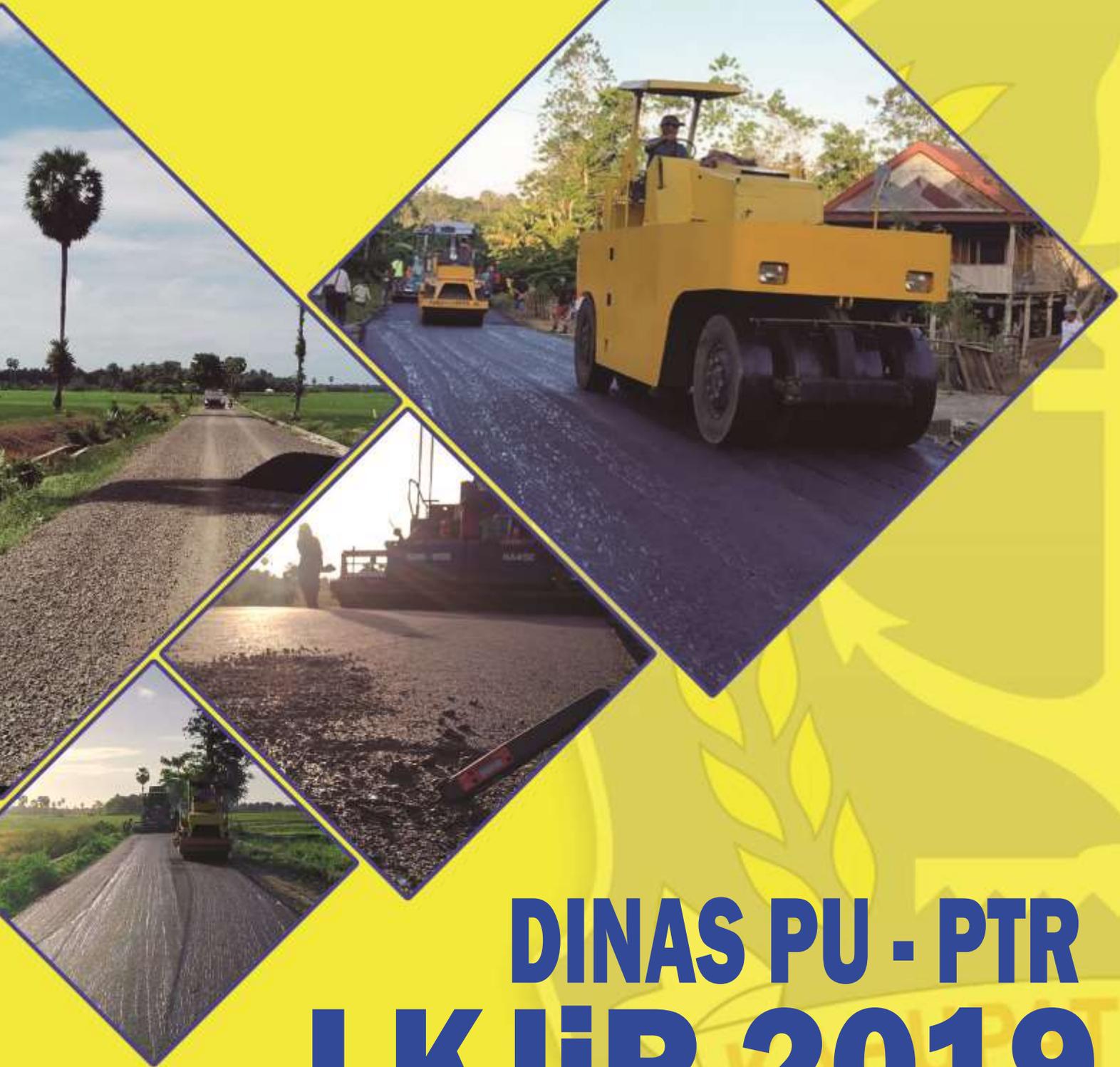




**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**DAN PENATAAN RUANG**



**DINAS PU - PTR**  
**LKJIP 2019**

[www.pu.bone.go.id](http://www.pu.bone.go.id)

Jalan Laksamana Yos Sudarso - Watampone, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan  
Telpon : (0481) 26907 - Email : [pu@bone.go.id](mailto:pu@bone.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 8 (Sepuluh) indikator kinerja utama, terdapat 6 (Enam) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 02 Februari 2020

**KEPALA DINAS PU – PTR  
KABUPATEN BONE**



**H. ASKAR, S.ST, M.Si**

Pangkat : Pembina

N.I.P. : 19681231 199803 1 042

---

# DAFTAR ISI

Hal.

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>v</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	<b>1 - I</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b>	<b>1 - I</b>
<b>1.2. Maksud dan Tujuan</b>	<b>2 - I</b>
<b>1.3. Gambaran Umum Organisasi</b>	<b>2 - I</b>
<b>1.4. Isu Strategis</b>	<b>17 - I</b>
<b>1.5. Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>18 - I</b>
<b>BAB. II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>1 - II</b>
<b>2.1. Rencana Strategis</b>	<b>1 - II</b>
<b>2.1.1. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1 - II</b>
<b>2.1.2. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>2 - II</b>
<b>2.1.3. Tujuan dan Indikator Kinerja</b>	<b>3 - II</b>
<b>2.1.4. Sasaran Indikator Kinerja</b>	<b>5 - II</b>
<b>2.1.5. Program Untuk Pencapaian Sasaran</b>	<b>6 - II</b>
<b>2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>7 - II</b>
<b>2.3. Rencana Anggaran Tahun 2017</b>	<b>8 - II</b>
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>1 - III</b>
<b>3.1. Capaian Kinerja Organisasi</b>	<b>1 - III</b>
<b>3.2. Perbandingan Capaian Kinerja</b>	<b>6 - III</b>
<b>3.3. Realisasi Anggaran</b>	<b>23 - III</b>
<b>3.3.1. Realisasi Penerimaan</b>	<b>23 - III</b>
<b>3.3.2. Realisasi Anggaran</b>	<b>23 - III</b>
<b>3.3.3. Pemanfaatan Anggaran</b>	<b>24 - III</b>
<b>3.3.3. Permasalahan Dan Solusi</b>	<b>24 - III</b>
<b>BAB. IV PENUTUP</b>	<b>1 - IV</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

---

## DAFTAR TABEL

Hal.

<b>Tabel.2.1. Tujuan Dan Indikator Kinerja Dinas PU- PTR</b>	<b>4 - II</b>
<b>Tabel.2.2. Sasaran Dan Indikator Kinerja Dinas PU- PTR</b>	<b>5 - II</b>
<b>Tabel.2.3. Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018</b>	<b>6 - II</b>
<b>Tabel.2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PU- PTR Kab. Bone</b>	<b>7 - II</b>
<b>Tabel.2.5. Rencana Belanja Dinas PU – PTR Kabupaten Bone TA. 2018</b>	<b>8 - II</b>
<b>Tabel.2.6. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018</b>	<b>8 - II</b>
<b>Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Dinas PU- PTR Tahun 2018</b>	<b>2 - III</b>
<b>Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama</b>	<b>5 - III</b>
<b>Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1</b>	<b>6 - III</b>
<b>Tabel 3.4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja</b>	<b>6 - III</b>
<b>Tabel 3.5. Tabel Data Kondisi Jalan Tahun 2013 - 2018</b>	<b>7 - III</b>
<b>Tabel 3.6. Tabel Kondisi Jembatan Tahun 2013 - 2018</b>	<b>8 - III</b>
<b>Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1</b>	<b>12 - III</b>
<b>Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2</b>	<b>14 - III</b>
<b>Tabel 3.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2</b>	<b>16 - III</b>
<b>Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3</b>	<b>18 - III</b>
<b>Tabel 3.11. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 3</b>	<b>18 - III</b>
<b>Tabel 3.12. Realisasi PAD Tahun 2018</b>	<b>19 - III</b>
<b>Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4</b>	<b>20 - III</b>
<b>Tabel 3.14. Realisasi Dokumen RTR</b>	<b>21 - III</b>
<b>Tabel 3.15. Analisis Indikator Capaian Urusan Penataan Ruang</b>	<b>21 - III</b>
<b>Tabel 3.16. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4</b>	<b>22 - III</b>
<b>Tabel 3.17. Rencana dan Realisasi Anggaran 2018</b>	<b>24 - III</b>
<b>Tabel 3.18. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pel;ayanan Perangkat Daerah</b>	<b>26 - III</b>

---

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Hal.</b>
<b>GRAFIK 3.1. CAPAIAN KINERJA PENANGANAN JALAN</b>	10 - III
<b>GRAFIK 3.2. CAPAIAN KINERJA PENANGANAN JEMBATAN</b>	11 - III
<b>GRAFIK 3.3. CAPAIAN KINERJA PENANGANAN JALAN DESA</b>	16 - III

---

## DAFTAR LAMPIRAN

- |   |
|---|
| <b>1. Foto Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2019</b>                                 |
| <b>2. Dokumentasi Alat Berat 2019</b>   |
| <b>3. Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun Anggaran 2019</b> |
| <b>4. Daftar Kegiatan Pemeliharaan Rutin Tahun Anggaran 2019</b>                  |
| <b>5. Data Kondisi Jalan dan Jembatan 2019</b>                                    |
| <b>6. Foto Copy Perjanjian Kinerja Tahun 2019</b>                                 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE**

Pembentukan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kepala dinas

2. Sekretariat dinas terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Program
3. Bidang Bina Teknik terdiri dari :
  - Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
  - Seksi Perencanaan
  - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
  - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah
5. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
  - Seksi Perencanaan Penataan Ruang
  - Seksi Pemanfaatan Ruang
  - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas umum :
  - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an
  - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas Umum
  - Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium
7. UPTD
8. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Dinas PU- PTR**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

##### **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta kebijakan Bupati;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. Pembinaan, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;.

## 2) Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan pelatihan;
- Melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/aset;

- Melaksanakan pembinaan staf; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.
- 2.2. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
  - Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja;
  - Melaksanakan penyusunan laporan standar pelayanan minimal (spm);
  - Menyiapkan rencana umum pengadaan;
  - Membuat rencana kerja tahunan; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait tugasnya.
- 2.3. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :
- Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
  - Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
  - Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
  - Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
  - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait tugasnya.

### 3) Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengelola urusan Pembinaan Teknik dan Jasa Konstruksi.

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik.
- Perencanaan dan pengawasan teknis bidang ke-pu an;
- Penyusunan rencana umum pengembangan jaringan jalan, fungsi dan status jalan kabupaten;
- Pengelolaan sistem manajemen jalan/jembatan;
- Penyusunan prioritas penanganan jaringan jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan justifikasi teknis;
- Pengawasan pemanfaatan jalan;
- Pengoordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembinaan teknik dan jasa konstruksi;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

#### 3.1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembinaan bidang pengembangan administrasi, pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi dan analisis dampak lingkungan konstruksi;
- Melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi;
- Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa konstruksi yang baru berlaku;
- Melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke-pu an;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

#### 3.2. Seksi Perencanaan Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Bina Teknik mempunyai tugas :

- Melaksanakan survey, investigasi dan evaluasi desain penanganan infrastruktur bidang ke-PU an;
- Menyusun perencanaan teknis infrastruktur bidang ke-PU an;
- Melaksanakan pengadaan jasa konsultan;

- Melaksanakan pembahasan dan evaluasi justifikasi teknis;
- Menginventarisir panjang, jumlah dan kondisi jalan/jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

3.2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan kegiatan penanganan jalan/jembatan, pengujian mutu konstruksi serta kegiatan ke-PU an lainnya;
- Melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
- Membahas dan mengevaluasi justifikasi teknis;
- Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke-PU an secara berkala maupun insidental;
- Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan ke-PU an;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

**4) Bidang Jalan Dan Jembatan**

Bidang Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dinas dalam bidang jalan dan jembatan serta pengembangannya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai fungsi :

- Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
- Pengelolaan dan pengendalian penanganan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Penetapan status, kelas dan fungsi jalan dan jembatan.
- Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan dan lintas kabupaten yang dibangun oleh prakarsa daerah.
- Pembinaan, pengelolaan dan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan.
- Pengordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

- 4.1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
- Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya
  - Menyusun urutan prioritas pembangunan jalan/jembatan.
  - Menyusun studi kelayakan gambar rab serta syarat teknis jalan/jembatan yang akan dibangun;
  - Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan/ jembatan;
  - Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  - Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
- 4.2. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas :
- Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakannya;
  - Mengelola manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - Menyusun dan melaksanakan jalan dan jembatan;
  - Menginventarisir data-data tentang pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - Menyusun urutan prioritas pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - Menyusun studi kelayakan;
  - Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  - Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
- 4.3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas:
- Menyusun petunjuk teknis bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
  - Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur wilayah termasuk manajemen pengelolaannya;
  - Melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengembangan infrastruktur wilayah;
  - Menyusun dan mempersiapkan laporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah;
  - Melaksanakan pembinaan teknis terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
  - Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  - Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah;

- Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Terkait Tugasnya.

### 5) Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan penataan ruang;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam penataan ruang;
- Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan penataan ruang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- Memfasilitasi dan membina dalam hal perencanaan penataan ruang kabupaten dan kawasan;
- Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan penataan ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya..

5.2. Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- Memfasilitasi dan membina dalam hal pemanfaatan ruang kabupaten dan kawasan;
- Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang;
- Menyusun kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

5.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin

oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

#### **6) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang kegiatan ke-PU an yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:

- Pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-pu an termasuk manajemen pengelolaannya;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana serta utilitas umum yang menunjang kegiatan ke-pu an.
- Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-pu an.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
- Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana ke-PU an.
- Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

- 6.2. Seksi Pembangunan / Pemeliharaan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum, seksi ini mempunyai tugas :
- Pembangunan/pemeliharaan utilitas umum bidang ke-pu an.
  - Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan utilitas umum.
  - Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan utilitas umum.
  - Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.
  - Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan utilitas umum bidang ke-pu an.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
- 6.3. Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium mempunyai tugas:
- Melaksanakan pengujian material dan pengujian mutu konstruksi jalan/jembatan.
  - Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dibidang ke-pu an
  - Melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang ke – pu an
  - Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan pengujian material bahan bangunan.
  - Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan (alat berat dan alat laboratorium) yang dikuasai dinas
  - Melaksanakan pengelolaan laboratorium;
  - Melaksanakan urusan/kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran operasional alat berat dan laboratorium;
  - Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
- 7) UPT Dinas**  
UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.
- 8) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional**  
Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Struktur Organisasi**

Perubahan struktur organisasi pada lingkup pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan Keputusan Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

9. Kepala dinas

10. Sekretariat dinas terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program

11. Bidang Bina Teknik terdiri dari :

- Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
- Seksi Perencanaan
- Seksi Pengawasan dan Pengendalian

12. Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :

- Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah

13. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :

- Seksi Perencanaan Penataan Ruang
- Seksi Pemanfaatan Ruang
- Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

14. Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas umum :

- Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an
- Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas Umum
- Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium

15. UPTD

16. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

**b. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- g. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangserta kebijakan Bupati;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- j. pembinaan, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;.

**2. Sekretaris Dinas**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- j. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- k. pelaksanaan program dan anggaran;
- l. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan adminsitrase kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- m. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- n. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;

- p. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- q. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan pelatihan;
- melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- melaksanakan pembinaan staf; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.2. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
- melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja;

- melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- menyiapkan rencana umum pengadaan;
- membuat rencana kerja tahunan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.3. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

### 3. Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengelola urusan Pembinaan Teknik dan Jasa Konstruksi.

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik.
- perencanaan dan pengawasan teknis bidang ke-PU an;
- penyusunan rencana umum pengembangan jaringan jalan, fungsi dan status jalan kabupaten;
- pengelolaan sistem manajemen jalan/jembatan;

- penyusunan prioritas penanganan jaringan jalan dan jembatan;
  - pelaksanaan justifikasi teknis;
  - pengawasan pemanfaatan jalan;
  - pengoordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembinaan teknik dan jasa konstruksi;
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;
- 3.1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :
- Melaksanakan pembinaan bidang pengembangan administrasi, pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi dan analisis dampak lingkungan konstruksi;
  - melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi;
  - melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa konstruksi yang baru berlaku;
  - melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke-PU an;
  - menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
- 3.2. Seksi Perencanaan Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Bina Teknik mempunyai tugas :
- melaksanakan survey, investigasi dan evaluasi desain penanganan infrastruktur bidang ke-PU an;
  - menyusun perencanaan teknis infrastruktur bidang ke-PU an;.
  - melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
  - melaksanakan pembahasan dan evaluasi justifikasi teknis;
  - menginventarisir panjang, jumlah dan kondisi jalan/jembatan;
  - menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
- 3.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :
- melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan kegiatan penanganan jalan/jembatan, pengujian mutu konstruksi serta kegiatan ke-PU an lainnya;
  - melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
  - membahas dan mengevaluasi justifikasi teknis;

- menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke-PU an secara berkala maupun insidental;
- melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan ke-PU an;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

#### 4. Bidang Jalan Dan Jembatan

Bidang Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dinas dalam bidang jalan dan jembatan serta pengembangannya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai fungsi :

- Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
- Pengelolaan dan pengendalian penanganan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Penetapan status, kelas dan fungsi jalan dan jembatan.
- Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan dan lintas kabupaten yang dibangun oleh prakarsa daerah.
- Pembinaan, pengelolaan dan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan.
- Pengordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

4.4. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya
- Menyusun urutan prioritas pembangunan jalan/jembatan.
- Menyusun studi kelayakan gambar rab serta syarat teknis jalan/jembatan yang akan dibangun;
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan/ jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

- 4.5. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas :
- Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakannya;
  - Mengelola manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - Menyusun dan melaksanakan jalan dan jembatan;
  - Menginventarisir data-data tentang pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - Menyusun urutan prioritas pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - Menyusun studi kelayakan;
  - Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  - Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
- 4.6. Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas:
- menyusun petunjuk teknis bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
  - melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur wilayah termasuk manajemen pengelolaannya;
  - melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengembangan infrastruktur wilayah;
  - menyusun dan mempersiapkan laporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah;
  - melaksanakan pembinaan teknis terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
  - menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  - melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

## 5. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan penataan ruang;

- pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam penataan ruang;
- penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan penataan ruang;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- memfasilitasi dan membina dalam hal perencanaan penataan ruang kabupaten dan kawasan;
- menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan Penataan Ruang;
- memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan Penataan Ruang;
- menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya..

5.2. Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- memfasilitasi dan membina dalam hal pemanfaatan ruang kabupaten dan kawasan;
- menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang;
- menyusun kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

5.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

## 6. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang kegiatan ke-PU an yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:

- Pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-PU an termasuk manajemen pengelolaannya;
- pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana serta utilitas umum yang menunjang kegiatan ke-PU an.
- pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-PU an.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an mempunyai tugas :

- melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
- melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana ke-PU an.
- menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.
- melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

6.2. Seksi Pembangunan / Pemeliharaan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum, seksi ini mempunyai tugas :

- Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas umum bidang ke-PU an.
- melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan utilitas umum.

- melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan utilitas umum.
- menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.
- melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan utilitas umum bidang ke-PU an.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

6.3. Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium mempunyai tugas:

- melaksanakan pengujian material dan pengujian mutu konstruksi jalan/jembatan.
- melaksanakan pengembangan teknologi terapan dibidang ke-PU an
- melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang ke – PU an
- melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan pengujian material bahan bangunan.
- melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan (alat berat dan alat laboratorium) yang dikuasai dinas
- melaksanakan pengelolaan laboratorium;
- melaksanakan urusan/kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran operasional alat berat dan laboratorium;
- menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

## 7. UPT Dinas

UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.

## 8. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (6) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1),

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.

- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

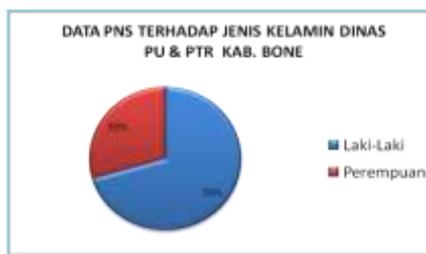
## 2.2 Sumber Daya SKPD

### a. Sumber Daya SKPD

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone di dukung dengan sumber daya pegawai sebanyak 117 orang yang terdiri dari :

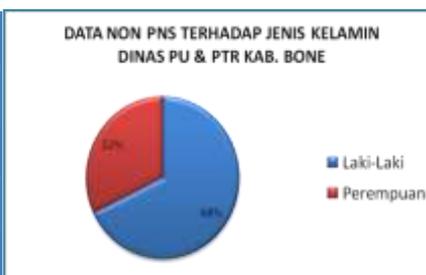
**Tabel 2.1. PNS Dinas PU-PTR Kab. Bone**

No	Jenis Kelamin	PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	Laki-Laki	43	70,49
2	Perempuan	18	29,51
<b>Total</b>		61	100,00



**Tabel. 2.2. Non PNS Dinas PU-PTR Kab. Bone**

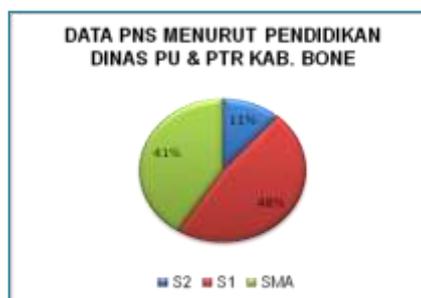
No	Jenis Kelamin	Non PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	Laki-Laki	38	67,86
2	Perempuan	18	32,14
<b>Total</b>		56	100,00



SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone Tahun

Tabel. 2.3. Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

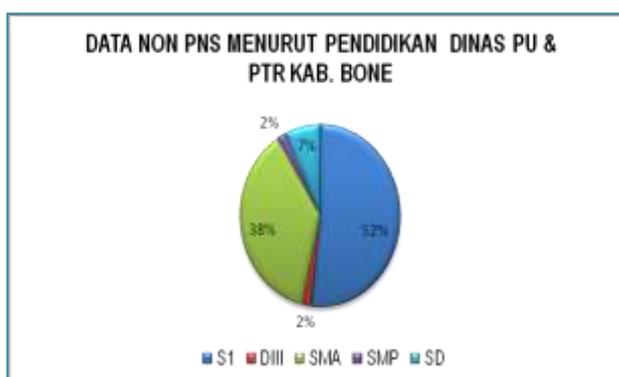
NO	Jenis Kelamin	PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	S2	7	11,48
2	S1	29	47,54
3	SMA	25	40,98
<b>Total</b>		61	100,00



SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone Tahun

Tabel. 2.4. Data Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

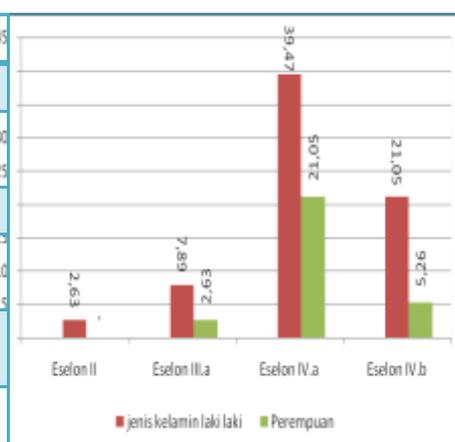
NO	Jenis Kelamin	Non PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	S1	29	51,79
2	DIII	1	1,79
3	SMA	21	37,50
4	SMP	1	1,79
5	SD	4	7,14
<b>Total</b>		56	100



SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone

Tabel. 2.5. Data PNS Berdasarkan Jenjang Pangkat

No	Jenjang Pangkat	Jenis Kelamin			
		Laki - Laki		Perempuan	
		Jumlah (Org)	%	Jumlah (Org)	%
1	Eselon II	1	2,63	0	-
2	Eselon III.a	3	7,89	1	2,63
3	Eselon IV.a	15	39,47	8	21,05
4	Eselon IV.b	8	21,05	2	5,26
<b>Total</b>		27	71,05	11	28,95
<b>Total Pegawai Keseluruhan</b>				38	100,00



SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone Tahun

Tabel. 2.6. Data PNS Berdasarkan Golongan

NO	Jenis Golongan	Jenis Kelamin			
		Laki - Laki		Perempuan	
		Jumlah (Org)	%	Jumlah (Org)	%
1	Golongan I	1	1,67	0	-
2	Golongan II	13	21,67	7	11,67
3	Golongan III	26	43,33	8	13,33
4	Golongan IV	3	5,00	2	3,33
<b>Total</b>		43	71,67	17	28,33
<b>Total Pegawai Keseluruhan</b>		<b>60</b>		<b>100</b>	

SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone Tahun 2019

#### b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas rutin sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone ditunjang dengan Sarana dan Prasarana gedung kantor yang merupakan Aset pemerintah Kabupaten Bone sesuai tabel berikut :

Tabel 2.7. Sumber Daya Sarana dan Prasarana  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama barang / jenis barang	Luas (m2)	Letak / alamat	Penggunaan	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Tanah bangunan kantor Pemerintah	220	Jalan Laks. Yos sudarso	Kantor dan gedung aula dinas pu & ptr	
2	Tanah bangunan kantor Pemerintah	380	Jalan andi celleng	Workshop bina Marga	

SUMBER DATA : SEKRETARIAT DINAS PU-

Selain Sarana dan Prasarana berupa benda tidak bergerak Dinas Pekerjaan Umum

Juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor sebagai kendaraan operasional sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel 2.8.**

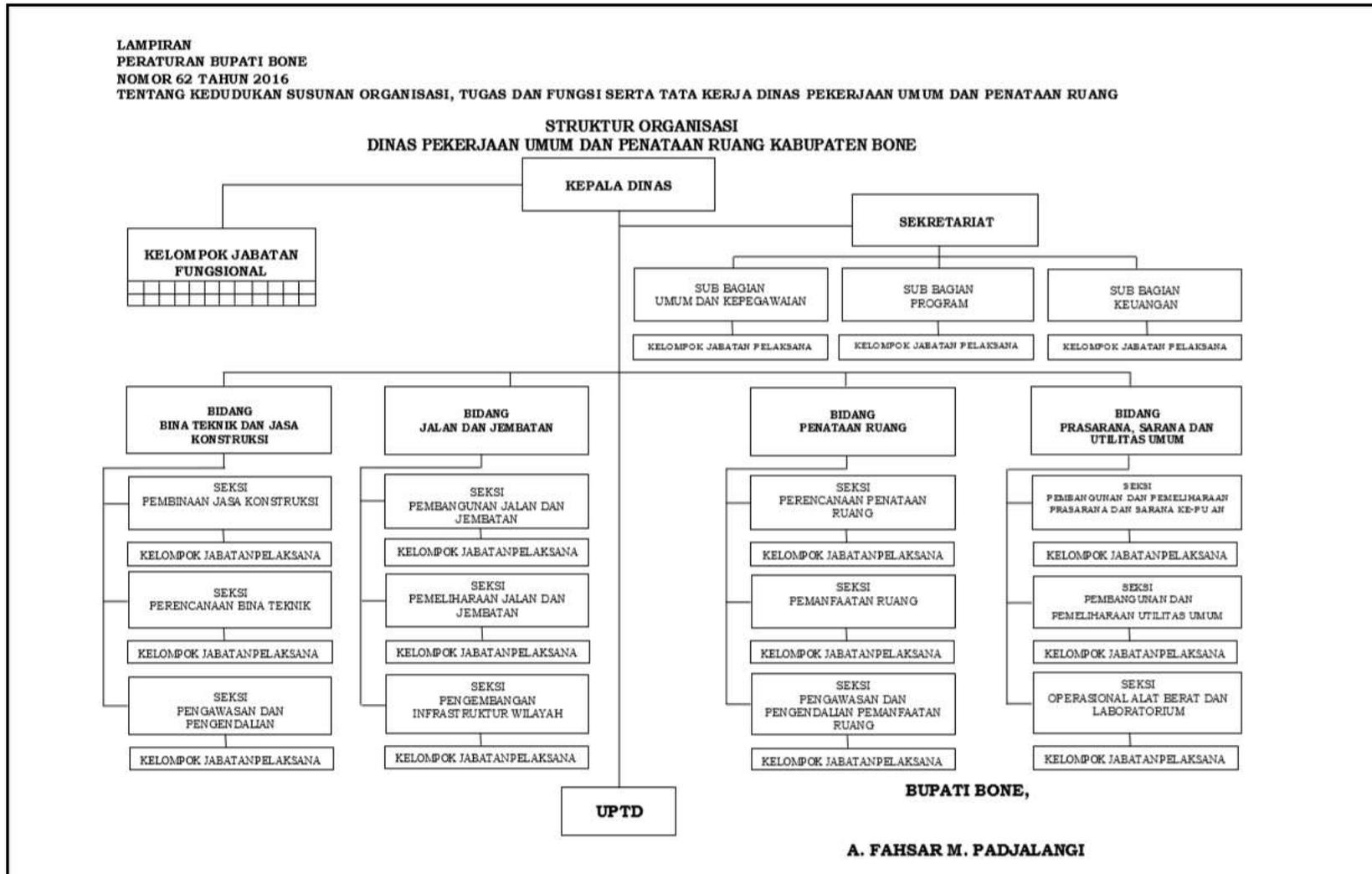
Sarana dan Prasarana Benda Bergerak

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang		Kondisi
1	2	3	4		5
1	Kendaraan Dinas Roda 4	2007	1	Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2007	1	Unit	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 4	2006	1	Unit	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 4	2006	1	Unit	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
6	Kendaraan Dinas Roda 2	2003	1	Unit	Kurang Baik
7	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
8	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
9	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
10	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
11	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
12	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	
13	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
14	Kendaraan Dinas Roda 2	2000	1	Unit	Kurang Baik
15	Kendaraan Dinas Roda 2 [ Propinsi ]	2008	1	Unit	Baik
16	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
17	Kendaraan Dinas Roda 2	2003	1	Unit	Kurang Baik
18	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik

19	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
20	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
21	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
22	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
23	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
24	Kendaraan Dinas Roda 2	2005	1	Unit	Baik
25	Kendaraan Dinas Roda 2 [ Propinsi ]	1999	1	Unit	Baik
26	Kendaraan Dinas Roda 2 [ Propinsi ]	2000	1	Unit	Baik
27	Kendaraan Dinas Roda 2	1999	1	Unit	Baik
28	Kendaraan Dinas Roda 2 [ Propinsi ]	2001	1	Unit	Baik
29	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
30	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
31	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
32	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
33	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
34	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
35	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
36	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
37	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
38	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
39	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
40	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Rusak Sekali
41	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
42	Kendaraan Dinas Roda	2002	1	Unit	Baik

	2				
<b>43</b>	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
<b>44</b>	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Baik
<b>45</b>	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
<b>46</b>	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
<b>47</b>	Kendaraan Dinas Roda 2	2004	1	Unit	Kurang Baik
<b>48</b>	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik

SUMBER DATA : BIDANG SARANA, PRASARANA DAN



### 1.3 ISU STRATEGIS

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi serta kebijakan yang tepat untuk mendukung visi dan misi yang sudah ada. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Berikut merupakan strategi yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.

1. Peningkatan kualitas manajemen kinerja Dinas PU-PTR secara berkelanjutan.
2. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan.
3. Penyusunan dan pemutakhiran data base kondisi jalan/jembatan dan jaringan irigasi.
4. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebinamargaan.
5. Membuat dokumen Rencana Tata Ruang yang berkualitas dan berkekuatan hukum.

#### 5.1. Arah Kebijakan

Selain diperlukan strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran juga diperlukan kebijakan. Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu ;

1. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yang berintegritas
2. Menjamin ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas manusia (disabilitas dan non disabilitas) untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyiapkan sistem informasi jalan/jembatan yang mutakhir dan akurat.
4. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan sesuai fungsi dan kegunaannya untuk mendukung kinerja ke-PU-an.
5. Melaksanakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari

berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bone. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang harus bergerak sedemikian cepat di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan (*Internal dan Eksternal*).

**i. Kekuatan (*Strength*)**

Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan, faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain:

- ❖ Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 69 orang Pegawai Negeri Sipil dan 38 orang tenaga harian lepas (jasa pendukung).
- ❖ Adanya dokumen perencanaan daerah yang hirarkinya sudah jelas yaitu : jangka panjang, menengah dan tahunan.
- ❖ Tersedianya dukungan anggaran baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- ❖ Tersedianya peralatan kebinamargaan dalam menunjang kegiatan kebinamargaan.

- ❖ Proses pelelangan kegiatan yang transparan dengan menggunakan sistem elektronik
- ❖ Tersedianya Data base jalan kabupaten yang berbasis SIG

ii. **Kelemahan (Weakness)**

Faktor kelemahan yaitu :

- ❖ Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari berupa, peralatan *Asphalt Mixing Plan* (AMP), alat-alat laboratorium, sarana transportasi serta pembenahan fasilitas gedung workshop.
- ❖ Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, struktur, kondisi tanah dasar yang labil, berbukit.
- ❖ Keterbatasan anggaran daerah maupun yang berasal dari pusat yang dialokasikan dalam menunjang kegiatan pembangunan

iii. **Peluang (Opportunity)**

Faktor-faktor peluang yaitu:

- ❖ Peningkatan struktur jalan yang telah dirintis pembukaannya oleh masyarakat melalui alokasi dana desa.
- ❖ Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan bidang Infrastruktur
- ❖ Terbuka peluang investasi untuk hasil-hasil sektor Infrastruktur terutama dikawasan objek wisata.
- ❖ Kebijakan Peningkatan status jalan berdasarkan kewenangan.

iv. **Ancaman(Threats)**

Faktor-faktor ancaman yaitu:

- ❖ Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pembangunan, sehingga sering terjadi perubahan rencana pelaksanaan di lokasi serta tuntutan masyarakat akan ganti rugi lahan atau tanaman pada lokasi pembangunan terkait pemilikan lahan lokasi pembangunan jalan dan jembatan.
- ❖ Kondisi infrastruktur jalan yang sempit disertai semakin tingginya pertumbuhan volume kendaraan dan arus lalu lintas sehingga dalam waktu

kedepan akan terjadi kemacetan dan juga meningkatnya pelanggaran muatan yang mengakibatkan kondisi jalan semakin menurun/ rusak.

- ❖ Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian c) sebagai bahan pendukung konstruksi.
- ❖ Pembagian kewenangan Jalan Pemerintah Desa belum di SK kan.
- ❖ Masih adanya kejadian bencana alam misalnya tanah longsor.
- ❖ Tugas dan Fungsimasing-masing OPD yang belum terintegrasi secara maksimal

Dengan melihat faktor-fakor diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci berhasil. Adapun faktor kunci yang di anggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, adalah:

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yaitu berupa Peralatan AMP, alat-alat laboratorium dan sarana pendukung lainnya.
2. Tersedianya data dan informasi jaringan jalan yang akurat dan aktual yang dapat diimplementasikan untuk bahan perencanaan data base jaringan jalan.
3. Meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan pelaku pembangunan dalam rangka proses penyusunan perencanaan pembangunan.

#### 1.4 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone pada Tahun 2019 antara lain :

##### 1. AYO KE LOTENG “Ayo Ke Locket Penataan Ruang”

Merupakan System Informasi Tata Ruang berbasis Web GIS (Geographic Information System) data/informasi perencanaan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone. Maksud dari system informasi ini adalah untuk sosialisasi informasi penataan ruang kepada masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah penyebarluasan informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bone sesuai dengan perda No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2013 –

2033 dan Perda No 6 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kawasan Perkotaan Watampone Tahun 2017-2037, agar mudah di akses oleh masyarakat, investor dan stakeholder yang membutuhkan atau memanfaatkan ruang di kabupaten Bone.

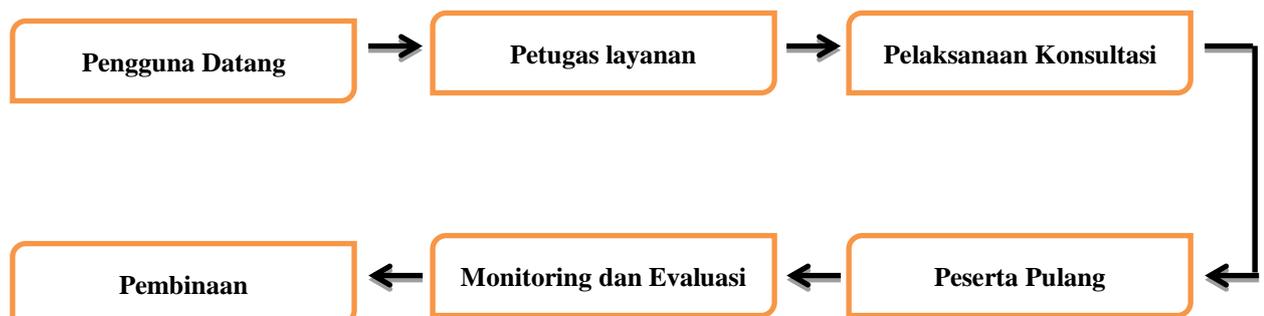
## 2. KLIKTEK “Klinik Konsultasi Teknis”

Seiring dengan perkembangan zaman. Pembangunan Infrastruktur menjadi hal yang wajib dilakukan, baik itu di kota maupun di desa. Dengan adanya program pemerintah mengenai dana desa, tentunya sangat membantu para perangkat desa untuk membangun daerahnya. Dalam pembangunannya sering ditemui berbagai kendala, baik dari segi teknis, pembangunan yang tidak tepat, ataupun penggunaan dana yang tidak tepat.

Melihat fenomena tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone yang dalam hal ini merupakan penanggung jawab utama dalam hal pembangunan infrastruktur merasa wajib dan tertantang untuk senantiasa memberikan inovasi serta pelayanan yang lebih baik. Salah satunya adanya Program Inovasi KLIKTEK (Klinik Konsultasi Teknis).

Klinik Konsultasi Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Merupakan program inovasi yang dimana memberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan masalah teknis dibidang jalan dan jembatan baik itu dari segi Proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasannya.

### Alur pelayanan klinik konsultasi Teknis



Kontak Person :

- Syamsul Bahri (0823-4567-5828)
- Rusdi (0852-9937-1455)

### 3. TIMPALAJA “Sistem Informasi Jalan dan Jembatan”

Sebuah aplikasi/program berbasis komputer yang memberikan support penyelenggaraan prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Bone untuk memudahkan dan memberi efisiensi pelayanan informasi berbasis data jalan dan jembatan, khususnya pada status jalan kabupaten (jalan yang penyelenggaraannya menjadi wewenang pemerintah kabupaten dan ditetapkan dengan SK Bupati) Program ini dirancang dengan memanfaatkan peta GIS (Geographic Information System) yaitu peta digital berbasis spasial yang dimodifikasi sehingga menjadi aplikasi tersendiri dalam pengelolaan jalan dan jembatan. Dari aplikasi TIMPALAJA ini dapat diperoleh informasi, yaitu:

1. Data jalan ; meliputi total panjang jalan dengan kondisi mantap maupun yang masih membutuhkan peningkatan dan rehabilitasi (Rusak ringan, sedang, dan berat)
2. Data Jembatan ; meliputi dimensi jembatan, kondisi bangunan atas, bangunan bawah, pondasi, serta lantai jembatan dalam persentase kerusakan ringan, sedang, dan berat.
3. Data Penanganan Jalan ; meliputi peta jalan yang sudah ditingkatkan maupun jalan yang mengalami pemeliharaan rutin (Penanganan retak, penanganan patching/lubang) jalan.
4. Penanganan Jembatan ; meliputi pemeliharaan rutin pada kondisi rusak ringan, seperti perbaikan lantai jembatan, pengecatan, perbaikan railing, dll maupun penanganan kondisi rusak sedang seperti perbaikan retaining wall pada oprit jembatan, hingga penanganan kondisi rusak berat seperti rekonstruksi jembatan.
5. Status jalan ; meliputi peta administrasi status jalan kabupaten (yaitu jalan yang penanganannya menjadi wewenang pemerintah kabupaten) yang dituangkan dalam SK Bupati
6. Kareba ; yaitu informasi seputar penyelenggaraan jalan dan jembatan di Kabupaten Bone

Untuk informasi, bisa menghubungi kami di [timpalaja@bone.go.id](mailto:timpalaja@bone.go.id)

### 4. YUCAWA “You Cal We Aktion”

Apabila menjumpai jalanan rusak atau prihatin dengan kondisi jalan dan jembatan, kami menyediakan saluran pengaduan yang disebut You Call We Action (Yucawa) yang bisa dimanfaatkan untuk melaporkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Bone. Kalau masyarakat Bone menemukan lubang pada jalan atau jembatan yang rusak, silakan difoto lalu tuliskan nama jalan dan kecamatannya. Jika smart phone anda dilengkapi koordinat GPS, silakan mencantumkan koordinatnya juga. Selanjutnya pengaduan tersebut akan diproses dan jika sesuai dengan kewenangan pada status jalan maka Dinas PU dan Penataan Ruang akan mengidentifikasi tingkat kerusakannya. Jika termasuk dalam

kategori rusak ringan maka dilakukan jenis pemeliharaan rutin swakelola. Jika tingkat kerusakannya membutuhkan rehabilitasi maka pemeliharaannya melalui proses tender. Diharapkan melalui aplikasi ini terjalin kerja sama antara pemerintah kabupaten Bone melalui Dinas PU dan Penataan Ruang dengan masyarakat untuk mewujudkan kota yang nyaman, aman, dan fasilitasnya bagus. Daripada menanam pisang di tengah jalan, ayo sama-sama membangun kota kita dengan memfoto jalanrusaktersebut dan mengadukannya pada YUCAWA.

**DOKUMENTASI PAMERAN INOVASI TAHUN 2019**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018 - 2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

##### **2.1.1. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

1. Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas
2. Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih

##### **2.1.2. Sasaran**

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas kemudian dirumuskan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Selanjutnya,

sasaran yang ditetapkan oleh Dnas PU-PTR Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

### 2.1.3. Tujuan Dan Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah merupakan cara untuk mencapai misi yang telah dirumuskan. Berikut adalah tujuan dan sasaran dari masing- masing misi, yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang :

Indikator kinerja dan target masing-masing kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Data Awal	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
1	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	59,18%	60,16%	61,14%	62,12%	63,10%	64,08%
			Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	44,70%	45,34%	45,98%	46,62%	47,26%	47,26%
2	Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang	97,80%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan	30,00%	30,25%	30,50%	30,75%	31,00%	31,25%
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Dinas PU-PTR atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB (BAIK)	CC	B	B	BB	BB	A

Sumber Bab. IV Renstra PU\_PTR Kab. Bone

#### 2.1.4. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel. 2.2.** Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN	PROGRAM
<b>Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan</b>	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
<b>Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah</b>	Program Perencanaan Tata Ruang
	Program Pemanfaatan Ruang
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Penunjang Pemerintahan Umum

Sumber Bab. VI Renstra PU\_PTR Kab. Bone

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berikut ini perjanjian kinerja yang telah disusun berdasarkan Dokumen Rencana Strategis untuk Tahun 2019, sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3.** Perjanjian Kinerja Dinas PU-PTR Kab Bone.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	Perseentase Kemantapan Jalan	%	60,16%
		Persentase Kondisi Baik Jembatan	%	45,34%
2.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Rencana Tata Ruang Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang	%	100%
		Persentase Ruang Terbuka Hijau Persatuan Wilayah Perkotaan	%	30,25%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip PU-PTR atas hasil Evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB (Baik)	-	B

### 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Indikator Kinerja Utama** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan **Indikator Kinerja Utama** sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama Dinas PU-PTR Kab. Bone berdasarkan SK IKU Kepala Dinas PU-PTR Kabupaten Nomor 2 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari Tahun 2019.

**Tabel. 2.4.** Indikator Kinerja Utama Dinas PU-PTR Kab. Bone

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	$\frac{\text{Kondisi Baik Jalan} + \text{Kondisi Sedang Jalan}}{\text{Panjang Total Jalan Kabupaten}} \times 100$	Data Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Berjalan
		Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	$\frac{\text{Kondisi Baik Jembatan}}{\text{Panjang Total Jalan Kabupaten}} \times 100$	Data Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Berjalan
2.	Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	Data Bidang Penataan Ruang Tahun Berjalan

Sumber : SK IKU Nomor 02 Tahun

### 2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 151.929.595.202,00 digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.5.** Rencana Belanja Dinas PU-PTR Kab. Bone T.A. 2019

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	PENDAPATAN DAERAH	688.495.000	0
2.	Pendapatan Asli Daerah	688.495.000	0
3.	Hasil Retribusi Daerah	658.495.000	0
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.000.000	0
5.	BELANJA DAERAH	69.648.204.915	87.461.164.822
6.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.290.106.235	- 110.241.700
7.	BELANJA PEGAWAI	5.290.106.235	- 110.241.700
<b>8.</b>	<b><u>BELANJA LANGSUNG</u></b>	<b><u>64.358.098.680</u></b>	<b><u>87.571.406.522</u></b>
9.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.745.130.000	9.258.462.713,58
10	BELANJA MODAL	51.612.968.680	78.312.943.808,42

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	5.179.864.535,00	3,296%
2	Belanja Langsung	151.929.505.202,00	96,704%
<b>Jumlah</b>		<b>157.109.369737,00</b>	<b>100</b>

SUMBER : DPA T.A 2019

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6.** Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	% ANGGARAN
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan (DAK+DAU)	32.688.372.680	<b>21,52</b>
			Perencanaan Pembangunan Jembatan	592.500.000	<b>0,39</b>
			Bulan Bakti Nasional	1.500.000.000	<b>0,99</b>
			Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	1.673.610.000	<b>1,10</b>
	Persentase Pembangunan Jembatan	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Jembatan	Pembangunan Jembatan (DAU)	4.093.876.600	<b>2,69</b>
	Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)		Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	574.815.000	<b>0,38</b>
					<b>29,57</b>

			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota	44.921.026.361	
			Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I	3.349.289.039	<b>2,20</b>
			Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X	925.000.000	<b>0,61</b>
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Utang)	4.210.000	<b>0,00</b>
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan (Utang)	2.482.500	<b>0,00</b>
	Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat2 Berat	345.700.000	<b>0,23</b>
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	150.000.000	<b>0,10</b>
			Penataan Halaman Gedung Workshop	226.555.000	<b>0,15</b>
			Penyusunan Database Fasilitas Penunjang Jalan	85.975.000	<b>0,06</b>
			Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	77.950.000	<b>0,05</b>
	Persentase Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (%)	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	7.871.000.000	<b>5,18</b>
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	46.078.200.000	<b>30,33</b>
	Persentase Pelaksanaan Undang-undang jasa konstruksi di Kabupaten Bone (%)	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan dan Perundang-undangan	92.125.000	<b>0,06</b>
Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase wilayah Kabupaten Bone yang memiliki dokumen tata ruang 100% (%)	Program Perencanaan Tata Ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	128.575.000	<b>0,08</b>
			Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	138.575.000	<b>0,09</b>
			Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	98.575.000	<b>0,06</b>
			Revisi Rencana Tata Ruang	1.050.000.000	<b>0,69</b>
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	400.000.000	<b>0,26</b>
	Persentase pemanfaatan ruang 100%	Program Pemanfaatan Ruang	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	57.275.000	<b>0,04</b>
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ruang 100% (%)	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	30.000.000	<b>0,02</b>

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	160.000.000	0,11
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	313.910.000	0,21
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	0,02
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	125.000.000	0,08
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke Luar Daerah	812.950.000	0,54
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	304.888.000	0,20
	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur (%)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	122.762.600	0,08
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000.000	0,20
			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	293.737.400	0,19
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	95.117.000	0,06
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	59.950.000	0,04
	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN dalam pengelolaan Pemerintahan, Keuangan dan Keterampilan khusus Bidang Ke Puan (%)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	0,07
	Cakupan Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu (%)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.405.000	0,01
	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Program Penunjang Pemerintahan Umum		136.430.000	0,09
				27.500.000	0,02
	Anggaran Utang dan lanjutan	<b>TOTAL</b>		1.876.168.023	1,23
		<b>TOTAL</b>		<b>151.929.505.202</b>	<b>100</b>

Sumber : DPA Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Tabel 2.6. tersebut diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Porsi anggaran berdasarkan persentase tertinggi sebesar 95,605 % untuk mendukung sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas jalan dan jembatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 145.252.687.179,13** dari total anggaran belanja langsung Dinas PU-PTR Kabuapten Bone di Tahun Anggaran 2019.
- Persentase anggaran selanjutnya sebesar 3,142% atau sebesar **Rp. 4.773.818.023** untuk mendukung sasaran 3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Persentase anggaran selanjutnya yang paling rendah adalah sebesar 1,253% atau sebesar **Rp. 1.903.000.000** dari total anggaran belanja langsung Dinas PU-PTR Kabuapten Bone di Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung sasaran 2 Meningkatkan kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Kab. Bone Tahun 2019 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Kab. Bone pada tahun 2019. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal Kinerja

NO	INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
	REALISASI KINERJA	
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100%	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap indikator kinerja dari sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dapat dinilai kriteria realisasi kerjanya berdasarkan persentase capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan

antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.2.** Skala pengukuran Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP

NO	KATEGORI	SKOR
1	AA (Sangat memuaskan)	7 (Tujuh)
2	A (Memuaskan)	6 ( Enam )
3	BB ( Sangat Baik )	5 ( Lima )
4	B ( Baik )	4 (Empat )
5	CC ( Cukup )	3 (Tiga)
6	C ( Kurang )	2 (Dua)
7	D (Sangat Kurang )	1 (Satu)

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018 dengan akumulasi di tahun sebelumnya (2013 – 2017)
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu tahun 2013 - 2018;
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Hasil evaluasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2019, selanjutnya akan diuraikan berdasarkan ketujuh tahapan evaluasi capaian kinerja tersebut.

### **Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**

Secara umum, realisasi capaian kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2019 telah memenuhi target kinerja dengan kategori

Baik ( $76\% \leq 100\%$ ), berdasarkan indikator sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 5 (Lima) indikator sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Realisasi capaian indikator kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupten Bone dibandingkan dengan target dari setiap sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.** Capaian Indikator Kinerja Dinas PU-PTR Kab. Bone Tahun 2019.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN	SAT	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	CAPAIAN (%)	KRITERIA KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	%	60,16	60,20	100,06	Baik Sekali
		Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	45,34	48,12	106,13	Baik Sekali
2.	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang	%	100	100	100%	Baik
		Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan	%	30,25	30,41	100,52	Baik Sekali
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Dinas PU-PTR atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemampuan RB (BAIK)	-	B	B	100	Baik
<b>Rata rata capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran</b>						<b>101,342</b>	<b>Baik Sekali</b>

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Tahun 2019 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 3.4.** Capaian Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	$\frac{\text{Kondisi Baik Jalan} + \text{Kondisi Sedang Jalan}}{\text{Panjang Total Jalan Kabupaten}} \times 100$	60,16 %	60,20 %	100,06 %
	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	$\frac{\text{Kondisi Baik Jembatan}}{\text{Panjang Total Jalan Kabupaten}} \times 100$	45,34 %	48,12 %	106,13 %
2.	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	100	100	100%

### **Perbandingan Capaian Kinerja**

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone pada tahun 2019 sesuai dengan pernyataan kinerja yang telah diperjanjikan, maka untuk mengevaluasi capaian kerjanya, dapat diketahui dengan melihat indikator kinerja yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja dari setiap indikator sasaran selanjutnya menjadi bahan evaluasi capaian kinerja organisasi. Evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan tujuh tahapan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang secara umum meliputi perbandingan dan analisis terkait realisasi kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2019.

Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra Tahun 2018 - 2023 dan RPJMD Tahun 2018-2023, maka Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2019 dapat dijelaskan melalui uraian perbandingan dan analisis realisasi kinerja dari tiap sasaran strategis berdasarkan tabel 3.3. adalah sebagai berikut :

**Sasaran Strategis Pertama :****1. Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan**

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

**Tabel 3.5.** Capaian Kinerja Sasaran 1- Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	60,16%	60,20%	100,06%
2.	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	45,34%	48,12%	106,13%

- Persentase Kemantapan jalan mencapai 60,20 % ditahun 2019 telah melampaui target kinerja yaitu 60,16% sehingga capaian kinerja untuk porsenattse kemantapan jalan mencapai 100,06% duathun 2019.
  - Persentase jembatan dalam kondisi baik mencapai 48,12% ditahun 2019 dari 60,16% yang ditagetkan hal ini berarti capaian kinerja mencapai 106,13% diTahun 2019.
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 1

**Tabel 3.6.** Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1. Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
	2017	2018	2019
Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	-	59,19%	60,20%
Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	42,21%	44,70%	48,12%

- Persentase kemantapan jalan Tahun 2019 mengalami kenaikan 1,01% dari tahun 2018 target rencana ditahun 2019 adalah 0,97%.
  - Persentase Jembatan dalam kondisi baik terjadi deviasai plus (+) 3,42% dari kenaikan rencana 0,64% dari tahun 2018.
3. Perbandingan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target akhir renstra

**Tabel. 3.7.** Perkembangan Capaian Indikator Kinerja sasaran 1 dengan target akhir Renstra.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	AKHIR RENSTRA	TAHUN 2019	CAPAIAN (%)
1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	%	64,08	60,20	93,94
2	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	47,26	48,12	101,81

Dari target renstra tahun 2023 kemantapan jalan menjadi 64,08% telah teralisasi sampai ditahun 2019 adalah 60,20% atau sekitar 93,34% dari target akhir renstra tersisa 3,88% untuk mencapai target akhir Renstra.

Untuk Persentase kondisi baik jembatan target renstra yang akan dicapai sampai dengan tahun 2023 adalah 47,26%, untuk capaian tahun 2019 sebesar 48,12% hal ini menunjukkan bahwa target kondisi baik akhir renstra telah tercapai bahkan melampaui target 2023 sebesar 101,81% deviasi plus (+) 0,86%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan capaian kinerja pada Tabel 3.3 diatas untuk Indikator Tujuan Sasaran 1 adalah persentase kemantapan jalan kabupaten sebesar 60,20% diperoleh berdasarkan data survey kondisi yang dengan hasil survey sebanyak 938,81 Km yang memiliki kondisi Baik dan Sedang atau capaian kinerja sebesar 100,06% dari target Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 3.8.** Kondisi Jalan Status Kabupaten

TAHUN	MANTAP (%)	BAIK (%)	RUSAK SEDANG (%)	RUSAK RINGAN (%)	RUSAK BERAT (%)
TAHUN 2018	59.19	44.01	15.18	17.18	23.63
TAHUN 2019	60,20	36.88	23.32	11.04	28.79
TAHUN 2020	-	-	-	-	-
TAHUN 2021	-	-	-	-	-
TAHUN 2022	-	-	-	-	-
TAHUN 2023	-	-	-	-	-

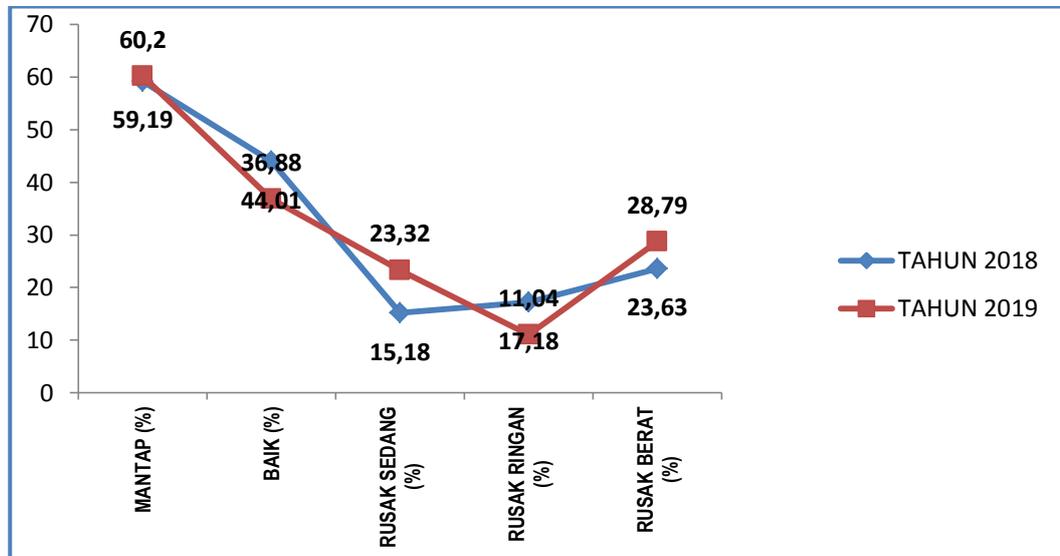
SUMBER : DATA KONDISI JALAN 2019 (Terlampir)

**Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten**

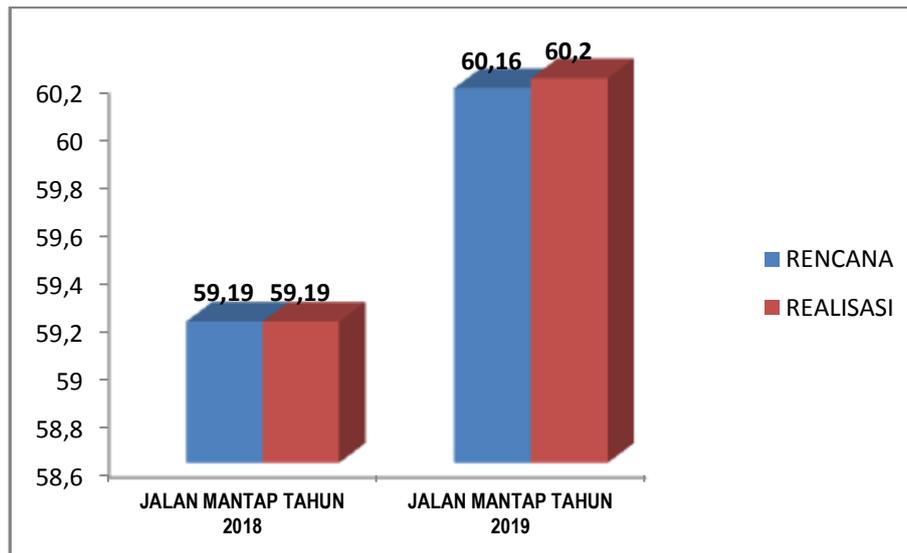
Kondisi Kemantapan Jalan Tahun 2019 terelaisasi 60,20% dari target 60,12% terjadi deviasi (+) 0,08% dari target tahun 2019. Terjadi kenaikan dari tahun 2018 sebesar 59,19% menjadi 60,20% atau sekitar 1,81% dari tahun

sebelumnya. Sebagaimana digambarkan pada diagram dan grafik di berikut ini :

**Gambar 1. Grafik Kondisi Jalan Tahun 2019**

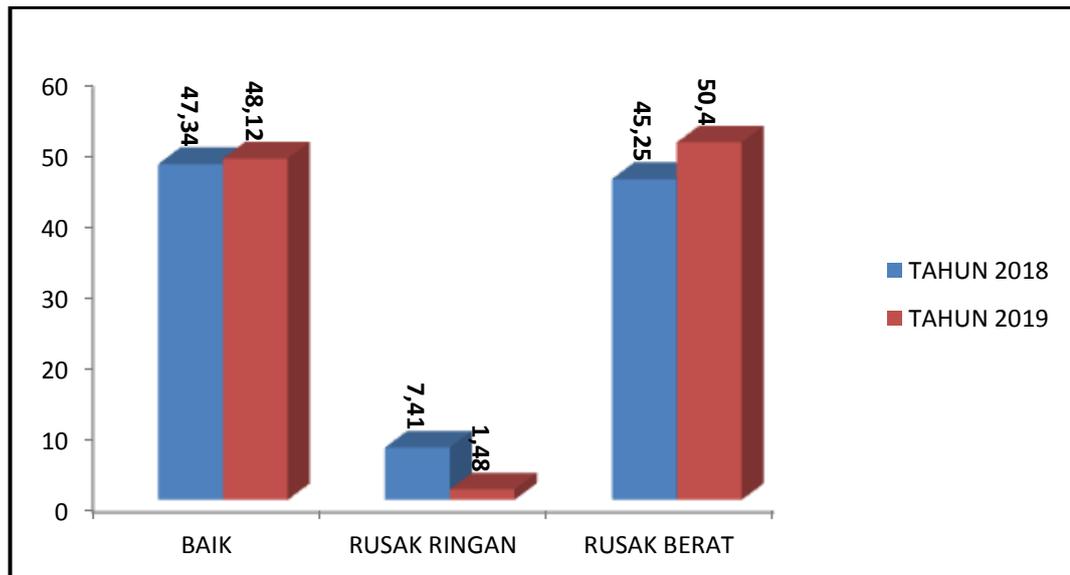


**Gambar 3. Diagram Kondisi Jalan Tahun 2019**



**Analisis Capaian Kondisi Jembatan**

Kondisi Baik jembatan tahun 2019 terealisasi sebesar 48,12 % dari target 45,34% atau terjadi deviasi (+) sebesar 2,78%. Terjadi kenaikan sebesar 1,4% dari realisasi kinerja tahun 2018. Sebagaimana yang tergambar pada diagram berikut ini :

**Gambar 2.** Diagram Kondisi Jembatan

Berdasarkan capaian kinerja pada Tabel 3.3 diatas untuk Indikator Tujuan Sasaran 2 adalah persentase jembatan kabupaten kondisi baik sebesar 48.12% diperoleh berdasarkan data survey kondisi yang dengan hasil survey sebanyak 2372,70 Meter yang memiliki kondisi Baik atau capaian kinerja sebesar 106,13% dari target Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 3.9.** Kondisi Jembatan Status Kabupaten Tahun 2018 - 2019

TAHUN	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
TAHUN 2018	47.34%	7,41%	45.25%
<b>TAHUN 2019</b>	<b>48.12%</b>	<b>1.48%</b>	<b>50.40</b>
TAHUN 2020	-	-	-
TAHUN 2021	-	-	-
TAHUN 2022	-	-	-
TAHUN 2023	-	-	-

SUMBER : DATA KONDISI JEMBATAN 2019 (TERLAMPIR)

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 1

Tabel 3.10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN 2019	EFISIENSI
1	2	3	4	(3-4)
1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	100,06%	88,89%	11,17%
2	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	106,13%	98,59%	7,54 %

- Berdasarkan tabel capaian kinerja untuk Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten mencapai 100,06% dari target tahun 2019, hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,17% dengan realisasi anggaran sebesar 88,89%.
- Untuk Persentase Jembatan dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 106,13% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 98,59 sehingga terjadi efisiensi sumber daya sebesar 7,54.

#### 6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.11. Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	% Keu.
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5/3x100
Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>36.454.482.680</b>	<b>35.608.592.100</b>	<b>845.890.580</b>	<b>97,68</b>
	Pembangunan Jalan (DAK+DAU)	32.688.372.680	32.581.723.400	106.649.280	
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	592.500.000	567.993.500	24.506.500	
	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	1.673.610.000	1.025.810.200	647.799.800	
	Bulan Bakti Nasional	1.500.000.000	1.433.065.000	66.935.000	
	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan</b>	<b>49.776.822.900</b>	<b>42.638.026.597</b>	<b>7.138.796.303</b>	<b>85,66</b>
	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	574.815.000	565.080.450	9.734.550	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota	44.921.026.361	37.816.851.920	7.104.174.441	
	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I	3.349.289.039	3.348.680.082	608.957	
	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X	925.000.000	907.414.145	17.585.855	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Utang)	4.210.000	-	4.210.000	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan (Utang)	2.482.500	-	2.482.500	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebenamargaan</b>	<b>886.180.000</b>	<b>835.981.196</b>	<b>50.198.804</b>	<b>94,34</b>
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat2 Berat	345.700.000	331.008.096	14.691.904	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-	150.000.000	140.471.000	9.529.000		

	alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan				
	Penataan Halaman Gedung Workshop	226.555.000	224.853.000	1.702.000	
	Penyusunan Database Fasilitas Penunjang Jalan	85.975.000	68.076.500	17.898.500	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	77.950.000	71.572.600	6.377.400	
	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>	<b>53.949.200.000</b>	<b>46.326.344.101</b>	<b>9.162.127.524</b>	<b>85,87</b>
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	7.871.000.000	6.745.101.501	1.125.898.499	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	46.078.200.000	38.116.236.325	7.961.963.675	
	<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>	<b>92.125.000</b>	<b>69.940.000</b>	<b>22.185.000</b>	<b>75,92</b>
	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan dan Perundang-undangan	92.125.000	69.940.000	22.185.000	
<b>Persentase Jembatan dalam kondisi Baik</b>	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>4.093.876.600</b>	<b>4.036.107.099</b>	<b>57.769.501</b>	<b>98,59</b>
	Pembangunan Jembatan (DAU)	4.093.876.600	4.036.107.099	57.769.501	

### 6.1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan \

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.838.567.877 realisasi anggaran Rp. 39.644.699.199 atau 97,08% tersisa anggaran sebesar Rp. 1.193.868.678. Realisasi Fisik 100%

#### 6.1.1. Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK + DAU)

Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 32.688.372.680 dengan realisasi anggaran Rp. 32.581.723.400 atau 99,67% dengan realisasi fisik 100% tersisa anggaran Rp. 106.649.280.

Kegiatan ini meliputi pembiayaan Perencanaan, pengawasan, pelaksanaan fisik dan biaya honorarium dan administrasi dalam rangka pelaksanaan fisik yang dimaksud.

**Tabel 6.1. Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Jalan T.A. 2019**

No	Nama Ruas (Lokasi)	Volume	Satuan
1	Ruas Jalan Lapuse - Lamurukung	4,15	Km
2	Ruas Jalan Telle - Taretta	6,15	Km
3	Ruas Jalan Welado - Opo	2,04	Km
4	Ruas Jalan Usa - Cumpiga	1,73	Km
	<b>TOTAL</b>	<b>14,07</b>	<b>Km</b>

*Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan*

#### 6.1.2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat perencanaan teknis jembatan berbentuk dokumen sebagai acuan teknis pelaksanaan fisik pembangunan jembatan yang dimaksud. Alokasi Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 592.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 567.993.500 atau 95,86% sisa anggaran Rp. 24.506.500.

Kegiatan ini meliputi 4 Paket Dokumen Perencanaan, Biaya administrasi dan honorarium terkait pelaksanaan kegiatan ini.

### 6.1.3. Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAU)



Kegiatan ini bertujuan melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan jembatan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.093.876.600 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.036.107.099 realisasi anggaran 98, 59% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini meliputi pekerjaan fisik jembatan,

biaya pengawasan, biaya administrasi dan honorarium terkait pelaksanaan kegiatan ini.

**Tabel 6.2. Realisasi Pembangunan Jembatan T.A. 2019**

No.	NAMA PEKERJAAN	PANJANG ( m )
1.	Pembangunan Jembatan Sungai Waji	9
2.	Pembangunan Jembatan Sungai Timurung	18,8
3.	Pembangunan Jembatan Sungai WatangTa	6
	<b>TOTAL</b>	<b>33,8</b>

*Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan*

**Tabel 6.3. Realisasi Pembangunan Jembatan T.A. 2019**

No.	NAMA PEKERJAAN	PANJANG ( m )
1.	Pembangunan Jembatan Desa Ajangpulu	5
2.	Bronjong Jembatan Sungai Cege	12
	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

*Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan*

#### **6.1.4. Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan**

Kegiatan ini dilakukan untuk memonitoring kondisi jalan dan jembatan serta mengetahui kondisi fisik dari jalan dan jembatan yang ada di kabupaten bone. Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.673.610.000 dengan realisasi anggaran Rp. 1.025.810.200 atau 61,29% dengan sisa anggaran Rp. 647.799.800. Realisasi anggaran meliputi Biaya pengawasan jalan dan jembatan.

#### **6.1.5. Kegiatan Bulan Bakti TNI**

Kegiatan ini sebagai wujud kerja sama dengan TNI dalam membantu menyiapkan pelaksanaan Infrastruktur jalan dan jembatan di perdesaan. Kegiatan bulan bakti TNI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 1.433.065.000 atau 95,54% dengan sisa anggaran Rp. 66.935.000. Realisasi anggaran meliputi Biaya Perencanaan, biaya fisik, biaya honorarium dan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DENGAN DAK



## 6.2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini dengan anggaran sebesar Rp. 49.776.822.900 dengan realisasi sebesar Rp.42.638.026.597 atau 85,66% sisa anggaran Rp. 7.138.796.303.

Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

### 6.2.1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kegiatan ini mendukung terwujudnya dokumen teknis perencanaan jalan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 574.815.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 565.080.450 atau 98,31% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.734.550.

### 6.2.2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan



Kegiatan ini telah melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal mewujudkan infrastruktur jalan. Rencana anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.921.026.361 dengan realisasi sebesar Rp.

37.816.851.920 atau 84,19% dengan realisasi fisik 94,31%.

Kegiatan ini telah melakukan pekerjaan fisik jalan sepanjang **20,095 Km** sebagaimana daftar dibawah ini.

**Tabel 6.4.** Daftar Ruas Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

No	NAMA RUAS	VOLUME	SAT.
1	Ruas Jalan Polewali-Packing	0,507	Km
2	Ruas Jalan Palattae-Sanrego	0,500	Km
3	Ruas Jalan Packing-Talabangi	0,500	Km
4	Ruas Jalan Hulo-Packing	0,600	Km
5	Ruas Jalan Calo-Buareng	0,500	Km
6	Ruas Jalan Bengo-Taka-Malaka	0,505	Km
7	Ruas Jalan Akae-Tajong	1,030	Km
8	Ruas Jalan Cakkebone-Unra		Km
9	Ruas Jalan IKK Ajangale	0,524	Km
10	Ruas Jalan Stadion Dalam	0,310	Km
11	Ruas Jalan Apala-Panyili	0,500	Km
12	Jalan Jend. Sudirman	2,215	Km
13	Jalan Abu Dg Pasolong	2,150	Km
14	Ruas Jalan Panyula-Palette	2,200	Km
15	Jalan Sukawati	1,256	Km

16	Jalan Ade Irma Nasution	0,109	Km
17	Jalan Batari Toja	0,294	Km
18	Jalan Lapatau	0,432	Km
19	Jalan Perintis	0,525	Km
20	Ruas Jalan Welalange-Labekku	1,879	Km
21	Jalan Andi Madeppungeng	0,150	Km
22	Jalan Kinibalu	0,573	Km
23	Jalan Orde Baru	0,162	Km
24	Jalan Petta Ponggawae	0,207	Km
25	Jalan Mesjid	0,165	Km
26	Jalan Merdeka	0,377	Km
27	Jalan Urip Sumoharjo	1,925	Km
	<b>TOTAL</b>	<b>20,095</b>	<b>KM</b>

**Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU - PTR**



Selain itu dalam kegiatan tersebut diatas, kegiatan ini telah membiayai ATK, Honorarium, Makan dan

minum, perjalanan dinas terkait pelaksanaan kegiatan ini.

### 6.2.3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I

Rencana anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.349.289.039 dengan realisasi sebesar Rp. 3.348.680.082 atau 99,98%. Kegiatan ini telah membiayai ATK, Honorarium, Makan dan minum, perjalanan dinas terkait pelaksanaan kegiatan ini, serta biaya pemeliharaan jalan.

### 6.2.4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X

Rencana anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 925.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 907.414.145 atau 98,10%. kegiatan ini telah membiayai ATK, Honorarium, Makan dan minum, perjalanan dinas

terkait pelaksanaan kegiatan ini, serta biaya pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

### 6.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini dengan lima kegiatan alokasi anggarannya sebesar Rp. 886.180.000 realisasinya Rp. 835.981.196 atau 94,34%.

#### 6.3.1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

##### Bengkel alat-alat Berat

Kegiatan ini dengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 345.700.000 realisasinya Rp. 331.008.096 atau 95,75%.

Kegiatan ini membiayai upah kerja operator alat berat, Penggantian suku cadang, bahan bakar, ATK, Biaya STNK, sevice, perjalanan dinas dan administrasi. Jenis alat berat dan kendaraan yang didanai oleh kegiatan ini adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 6.5.** Daftar Alat dan Kendaraan Berat Dinas PU – PTR

NO	Jeni Alat & Kendaraan Berat	Vol.Sat	Kondisi
1	EXCAVATOR	1 UNIT	Baik
2	WHEL LOADER	2 UNIT	Rusak Ringan
3	MOTOR GRADER	3 UNIT	Rusak Ringan
4	BECHO LOADER	1 UNIT	Baik
5	WALES TANDEM	1 UNIT	Baik
6	WALES DORONG	1 UNIT	Baik
7	WALES DUAS RODA	1 UNIT	Baik
8	WALES TIG A RODA	1 UNIT	Baik
9	TRUCK	3 UNIT	Baik

SUMBER : DATA KONDISI PERALATAN

#### 6.3.2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Kegiatan ini dengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 150.000.000 realisasinya Rp. 140.471.000 atau 93,65%. Kegiatan ini membiayai pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.

### **6.3.3. Kegiatan Penataan Halaman Gedung Workshop**

Kegiatan ini dengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 226.555.000 realisasinya Rp. 224.853.000 atau 99,25%. Kegiatan ini membiayai Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Workshop. Serta membiayai ATK, Honorarium, Makan dan minum, perjalanan dinas terkait pelaksanaan kegiatan ini.

### **6.3.4. Kegiatan Penyusunan Database Fasilitas Penunjang Jalan**

Kegiatan ini dengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 85.975.000 realisasinya Rp. 68.076.500 atau 79,18%. Kegiatan ini membiayai ATK, Honorarium, Makan dan minum, perjalanan dinas terkait pelaksanaan kegiatan ini.

### **6.3.5. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan**

Kegiatan ini dengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 77.950.000 realisasinya Rp. 71.572.600 atau 91,82%. Kegiatan ini membiayai ATK, Honorarium, Makan dan minum, perjalanan dinas terkait pelaksanaan kegiatan ini.

## **6.4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.**

Program ini dengan dua kegiatan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.488.471.625 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.326.344.101 atau 83,49% dengan fisik 192,03%. Kegiatan pada program ini yaitu :

### **6.4.1. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaa**

Kegiatan ini mendukung tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal penyiapan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah permukiman di perdesaan. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 7.871.000.000 realisasi Rp. 6.745.101.501 atau 85,70% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.125.898.499 dengan fisik 100%. Kegiatan ini merealisasikan 17 Paket Jalan sebagaimana daftar tabel terlampir pada lampiran 2.15.2. Selain membiayai fisik baik perencanaan dan pengawasan kegiatan ini juga membiayai perjalanan dinas, ATK, Makan dan Minum, Honorarium dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.

#### **6.4.2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Bantuan Keuangan Provinsi)**

Kegiatan ini telah melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal mewujudkan infrastruktur jalan. Rencana anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 46.078.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. 38.116.236.325 atau 82,72% dengan realisasi fisik 92,03%. Kegiatan ini telah melakukan pekerjaan fisik jalan sepanjang 28,62 Km dan jembatan sepanjang 50,8 m.

#### **6.5. Program Pengaturan Jasa Konstruksi**

Program ini dengan satu kegiatan alokasi anggarannya sebesar Rp. 92.125.000 realisasinya Rp. 69.940.000 atau 75,92%. Kegiatan ini membiayai ATK, Honorarium, Makan dan minum, perjalanan dinas terkait pelaksanaan kegiatan.

##### **6.5.1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat Berat**

Kegiatan ini dengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 345.700.000 realisasinya Rp. 331.008.096 atau 95,75%. Kegiatan ini membiayai upah kerja operator alat berat, Penggantian suku cadang, bahan bakar, ATK, Biaya STNK, sevice, perjalanan dinas dan administrasi.



#### 7. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Dalam mencapai sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut :

- Masih terdapat jalan strategis yang seharusnya menjadi kewenangan kabupaten namun masih kewenangan pemerintah desa sehingga kedepan direncanakan untuk dilakuka peralihan data base jalan dan jembatan untuk peningkatan status jalan.
- Data base jembatan masih tidak efektif untuk dijadikan data perencanaan karena masalah pembagian kewenangan yang masih tumpang tindih antara kewenangan kabuapten dan desa.

#### **Sasaran Strategis Kedua :**

##### **2. Meningkatnya Kualitas Implementasi Rencana Tata Ruang Dalam Pembangunan Daerah**

##### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2

**Tabel 3.12.** Capaian Kinerja Sasaran 2 - Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
1	Persentase kesesuaian Tata Ruang	100%	100%	100%
2.	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan	30,25%	30,41%	100,52%

- Persentase kesesuaian Tata Ruang untuk tahun 2019 sebesar 100% tercapai berdasarkan target 2019
  - Persentase Ruang terbuka hijau dari target 2019 sebesar 30,25% tercapai sebesar 30,41% atau sebesar 100,52% dari target rencana capaian tahun 2019.
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 2

**Tabel 3.13.** Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2. Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
	2017	2018	2019
Persentase kesesuaian Tata Ruang	-	97,80%	100%
Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan	-	30,01%	30,41%

- Persentase kesesuaian Tata Ruang tahun 2018 terealisasi 97,80% untuk tahun 2019 terealisasi 100% atau terjadi peningkatan sebesar 2,2% dari tahun sebelumnya.
  - Persentase ruang terbuka hijau tercapai 30,01% ditahun 2018 terjadi deviasi plus (+) 0,4% ditahun 2019 menjadi 30,41% sebagaimana data terlampir.
3. Perbandingan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target akhir renstra

**Tabel. 3.14.** Perkembangan Capaian Indikator Kinerja sasaran 1 dengan target akhir Renstra.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	AKHIR RENSTRA	TAHUN 2019	CAPAIAN (%)
----	-------------------	--------	---------------	------------	-------------

1	Persentase kesesuaian Tata Ruang	%	100	100	100
2	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan	%	31,25	30.41	97,312%

- Persentase kesesuaian tata ruang diakhir renstra adalah 100% sementara capaian ditahun 2019 adalah 100%. Namun kondisi kesesuaian tata ruang akan mengalami kondisi fluktuatif sesuai dengan perkembangan pembangunan dan penyebaran penduduk yang akan memicu kebutuhan ruan yang lebih banyak dengan berbagai jenis lahan.
  - Persentase ruang terbuka hijau sebesar 31,25% diakhir Renstra namun ditahun 2019 telah mencapai 30,41% sehingga selisih untuk targer renstra tahun 2023 sebesar 0,84%
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Persentase kesesuaian tata ruang sangat bergantung terhadap pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh semua pihak terlebih peran serta masyarakat untuk patuh dan taat terhadap aturan tata ruang dalam kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Persentase ruang terbuka hijau yang di Kab. Bone masih banyak yang belum mnejadi asset pemerintah daerah, sehingga tidak menajmin pelesatarian Ruang Terbuka Hijau, sehingga kedepan diharapkan agar melaksanakan pembebasan lahan RTH yang terinventaris di Bidang Penataan Ruang di Dinas PU-PTR Kabupaten Bone.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 2

**Tabel 3.15.** Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN 2019	EFISIENSI
1	2	3	4	(3-4)
1	Persentase kesesuaian Tata Ruang	100%	48.745%	51,255%
2	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan	100,52%	0	100.52%

luas wilayah perkotaan
------------------------

- Berdasarkan tabel diatas maka efisiensi untuk Persentase kesesuaian lahan sebesar 51,255% dengan realisasi keuangan 48,745% mampu mencapai target kinerja sebesar 100%.
- Untuk Ruang terbuka hijau dengan anggaran Rp. 0 telah melampaui target kinerja sebesar 100,52%.

## 6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 2

**Tabel 3.16.** Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	% Keu.
Persentase kesesuaian Tata Ruang	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>1.815.725.000</b>	<b>863.763.800</b>	<b>951.961.200</b>	<b>47,57</b>
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	128.575.000	45.036.300	83.538.700	
	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	138.575.000	68.201.500	70.373.500	
	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	98.575.000	81.379.000	17.196.000	
	Revisi Rencana Tata Ruang	1.050.000.000	641.094.000	408.906.000	
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	400.000.000	28.053.000	371.947.000	
	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>57.275.000</b>	<b>39.800.000</b>	<b>17.475.000</b>	<b>69,49</b>
	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	57.275.000	39.800.000	17.475.000	
	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>30.000.000</b>	<b>24.050.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>80,17</b>
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	30.000.000	24.050.000	5.950.000	
Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	0	0	0	0
	Penataan RTH	0	0	0	0

## **6.1. Program Perencanaan Tata Ruang**

Program ini terdiri dari lima kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.815.725.000 dengan realisasi anggaran Rp. 863.763.800 atau 47,57% dengan sisa dana sebesar Rp. 951.961.200

### **6.1.1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang**

Rencana anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 128.575.000 terealisasi Rp. 45.036.300 atau 35,03% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 83.538.700. Kegiatan ini meliputi Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS. Termasuk membiayai administrasi dan honorarium dalam rangka melaksanakan kegiatan ini.

### **6.1.2. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan.**

Kegiatan ini mendorong terciptanya perda tentang kawasan dari Dokumen RDTR yang sudah ada. Rencana anggaran sebesar Rp. 138.575.000 dengan realisasi anggaran Rp. 68.201.500 atau 49,22% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 70.373.500.

Kegiatan ini meliputi kegiatan sosialisasi rancangan Perda RDTR, Sosialisasi Rancangan Perda Bangunan Gedung, membiayai administrasi dan honorarium terkait pelaksanaan kegiatan ini.

### **6.1.3. Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang**

Rencana anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 98.575.000 terealisasi Rp. 81.379.000 atau 82,56% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 17.196.000.

Kegiatan ini meliputi belanja makan dan minum rapat serta membiayai administrasi dan honorarium dalam rangka melaksanakan kegiatan ini.

#### **6.1.4. Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang.**

Kegiatan ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal meujudkan dokumen RTRW yang efektif. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.050.000.000 realisasi sebesar Rp. 641.094.000 atau 61,06% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 408.906.000.

Kegiatan ini membiayai honorarium Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Ahli. Termasuk ATK dan Administrasi serta Honorarium dalam pelaksanaan kegiatan ini.

#### **6.1.5. Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan**

Kegiatan ini mendukung tugas fungsi pokok dalam sasaran penataan ruang dalam hal teredianya dokumen tentang RDTR Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. Rencana anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 400.000.000 terealisasi Rp. 28.053.000 atau 7,01% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 371.947.000.

Kegiatan ini meliputi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan “Mallusetasi” 1 dokumen. Termasuk membiayai administrasi dan honorarium dalam rangka melaksanakan kegiatan ini.

## **6.2. Program Pemanfaatan Ruang**

Program ini dengan satu kegiatan yaitu Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi terkait penataan ruang dengan member rekomendasi kelayakan izin terhadap jenis bangunan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 57.275.000 dengan realisasi Rp. 39.800.000 atau 69,49% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 17.475.000.

Kegiatan ini meliputi perjalanan dinas, honorarium, ATK terkait pelaksanaan program dan kegiatan ini.

### **6.3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000 terealisasi sebesar Rp. 24.050.000 atau 80,17% tersisa anggaran Rp. 5.950.000. Kegiatan ini meliputi Belanja bahan pameran, Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan ATK dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

## **7. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

- Persentase kesesuaian lahan masih menggunakan RTRW yang belum direvisi sehingga kesesuaian tata ruang masih mencapai 100%. Kemungkinan setelah Revisi RTRW dan penetapan Perda RTRW akibat revisi di tetapkan maka kemungkinan terjadi perubahan persentase kesesuaian tata ruang di Wilayah Kab. Bone.
- Masih ada RTH yang ada belum menjadi asset pemerintah Kab. Bone namun telah ditetapkan pada RDTR Wilayah perkotaan menjadi spasial RTH yang tersebar. Kemungkinan yang akan terjadi bahwa pengelolaan lahan RTH tersebut menjadi hak pemilik yang akan diperuntukkan hal lain oleh pemiliknya, sehingga pengawasan dan pengendalian disertai dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan.

### **Sasaran Strategis Ketiga :**

**3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan**

## 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 3

**Tabel 3.17.** Capaian Kinerja Sasaran 3- Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
1	Nilai SAKIP Dinas PU-PTR atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB (BAIK)	B	B	-

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 3

**Tabel 3.18.** Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
	2017	2018	2019
Nilai SAKIP Dinas PU-PTR atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB (BAIK)	-	B	B

## 3. Perbandingan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target akhir renstra

**Tabel. 3.19.** Perkembangan Capaian Indikator Kinerja sasaran 1 dengan target akhir Renstra.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	AKHIR RENSTRA	TAHUN 2019	CAPAIAN (%)
1	Nilai SAKIP Dinas PU-PTR atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB (BAIK)	%	A	B	-

## 4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Predikat Evaluasi SAKIP merupakan indikator penilaian pencapaian kinerja organisasi yang penilaiannya berdasarkan pada dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dokumen pendukung lainnya.

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan predikat B akan tetapi kegiatan evaluasi oleh inspektorat kabupaten bone belum dilaksanakan setelah laporan ini dibuat sehingga realisasi belum dapat dilaporkan. Sedangkan untuk capaian Tahun 2018 mendapatkan nilai CC atau dengan kategori Cukup, Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Dinas PU-PTR dalam menyusun dokumen perencanaan sekiranya memerhatikan potensi dan kekuatan yang ada sehingga target yang akan dicapai dapat diperhitungkan dengan baik.
2. Dinas PU-PTR untuk melaporkan evaluasi internal yang dilaksanakan setiap periode tertentu.

Predikat yang dicapai pada Tahun 2018 dikategorikan Cukup sehingga langkah langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah sebagai berikut :

- Melakukan perbaikan dokumen SAKIP berdasarkan Rekomendasi hasil review inspektorat kabupaten Tahun 2018
- Mengikuti BIMTEK terkait penyusunan Laporan SAKIP
- Melakukan Asistensi penyusunan Dokumen SAKIP baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi.

#### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 3

Tabel 3.20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN 2019	EFISIENSI
1	2	3	4	(3-4)
1	Nilai SAKIP Dinas PU-PTR atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB (BAIK)	100%	94,26%	12,17%

Berdasarkan tabel diatas maka efisiensi nilai SAKIP Dinas PU-PTR atas hasil evaluasi Inspektorat adalah 12,17% target tercapai sebesar 100% dengan efektif penggunaan anggaran sebesar 94,26%.

## 6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 3

**Tabel 3.21.** Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	% Keu.
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5/3x100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.746.748.000</b>	<b>1.671.520.654</b>	<b>75.227.346</b>	<b>95,69</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	160.000.000	156.530.058	3.469.942	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	313.910.000	249.838.396	64.071.604	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	29.345.000	655.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	125.000.000	125.000.000	-	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke Luar Daerah	812.950.000	812.722.300	227.700	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	304.888.000	298.084.900	6.803.100	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>871.567.000</b>	<b>807.248.650</b>	<b>64.318.350</b>	<b>92,62</b>
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	122.762.600	98.423.100	24.339.500	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000.000	298.427.000	1.573.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	293.737.400	276.497.550	17.239.850	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	95.117.000	76.325.000	18.792.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	59.950.000	57.576.000	2.374.000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100.000.000</b>	<b>85.676.000</b>	<b>14.324.000</b>	<b>85,68</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	85.676.000	14.324.000	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>15.405.000</b>	<b>12.841.500</b>	<b>2.563.500</b>	<b>83,36</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.405.000	12.841.500	2.563.500	
	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>163.930.000</b>	<b>153.896.000</b>	<b>10.034.000</b>	<b>93,88</b>
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	136.430.000	126.396.000	10.034.000	
	Promosi dan Pameran Pembangunan	27.500.000	27.500.000	-	

## **6.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.746.748.000 dengan realisasi anggaran Rp. 1.671.520.654 atau 95,69%. Pada program ini terdiri 6 Kegiatan.

### **6.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dialokasikan dana sebesar Rp. 160.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.156.530.058,- dengan sisa anggaran Rp. 3.469.942,- atau realisasi 97,83%.

Sedangkan kegiatan fisik 100%.Kegiatan ini meliputi pembayaran jasa komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jasa Air PDAM dan Telepon serta Wifi.

### **6.1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**

Kegiatan Ini Merupakan pendukung dalam rangka penataan administrasi umum dan keuangan untuk mencapai tertib pelaporan tepat waktu. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.313.910.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 294.838.396,- dengan sisa anggaran Rp. 64.071.604 atau 79.59% sedangkan kegiatan 100%.

### **6.1.3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Kegiatan Ini Merupakan pendukung dalam rangka penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor meliputi Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih. Alokasi Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.345.000 atau 97,82% tersisa anggaran Rp. 655.000 dengan realisasi fisik 100% .

### **6.1.4. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu peningkatan wawasan aparatur khususnya dalam Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta penataan ruang. Termasuk juga terhadap kontrol sosial oleh masyarakat melalui media cetak dan media on line, kegiatan ini

dialokasikan dana sebesar Rp.125.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.125.000.000,-dengan sisa anggaran Rp. 0,- atau realisasi keuangan 100% dan fisik 100%.Kegiatan ini meliputi pembayaran beberapa media informasi yang ada di Kabupaten Bone baik media harian/mingguan serta majalah.

#### **6.1.5. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah.**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka perlu melakukan rapat koordianasi dalam daerah ataupun luar daerah Kabupaten Bone. Alokasi Anggaran Rp. 812.950.000 Realisasi Anggaran Rp. 812.722.300 atau 99.97% serta sisa anggaran Rp. 227.700.

Kegiatan ini mendanai perjalanan dinas di dalam Kabupaten Bone ataupun diluar Kabupaten Bone berdasarkan surat tugas.

#### **6.1.6. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kaupaten Bone dialokasikan dana sebesar Rp. 304.888.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 298.084.900,- atau realisasi 97.77%, sisa anggarn Rp. 6.803.100 . Kegiatan ini meliputi belanja Alat tulis kantor, Belanja makan dan minum harian pegawai, makan dan minum rapat serta belanja makan dan minuman tamu.

### **6.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 871.567.000 dengan realisasi anggaran Rp. 807.248.650 atau 92.62% dengan sisa anggaran Rp. 64.318.350.Program ini terdiri dari 5 Kegiatan.

#### **6.2.1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung sarana dan prasarana perkantoran dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Alokasi Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 122.762.600 realisasi anggaran Rp. 98.423.100 atau 80,17% dengan sisa anggaran Rp. 24.339.500. Kegiatan ini meliputi

pengadaan Laptop 4 Unit, pengadaan TAB6 Unit, dan pengadaan printer A3 2 Unit.

#### **6.2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memelihara gedung kantor agar dipertahankan kondisi bangunan tetap terjaga pemanfaatan gedung dengan maksimal. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 298.427.000 atau 99,48% dan sisa anggaran Rp. 1.573.000.

Kegiatan ini meliputi pembiayaan terhadap Pemeliharaan dan Penataan halaman dan perbaikan ruangan yang ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Jalan Laksamana Yos Sudarso Watampone.

#### **6.2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung operasional dan mobile aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 293.737.400 dengan realisasi Rp. 276.497.550 atau 94,13% dengan sisa anggaran Rp. 17.239.850.

Pembiayaan kegiatan ini meliputi Biaya jasa service kendaraan, Penggantian suku cadang, Bahan Bakar, Biaya surat nomor kendaraan.

#### **6.2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**

Kegiatan ini diperuntukkan untuk memelihara peralatan gedung kantor agar tetap berfungsi dengan baik. Alokasi Anggaran Rp. 95.117.000 realisasi Rp. 76.325.000 atau 80,24% tersisa anggaran Rp. 18.792.000.

Kegiatan ini meliputi pembiayaan perbaikan/Pemeliharaan AC Split, perbaikan printer, komputer, sound system, alat listrik, dan Website.

#### **6.2.5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melengkapi sarana dan prasarana pada rumah dinas yang ada. Alokasi Anggaran Rp. 59.950.000 realisasi Rp. 57.576.000 atau 96,04% tersisa anggaran Rp. 2.374.000.

Kegiatan ini meliputi pembiayaan pembangunan pos jaga samping rumah dinas.

### 6.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000 realisasi Rp. 85.676.000 atau 85,68% dengan sisa anggaran Rp. 14.324.000.

Program dan Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas. Kegiatan ini berupa Kursus singkat dan pelatihan serta pelatihan



teknis laboratorium aspal.

### 6.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini dengan satu kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.405.000 realisasi Rp. 12.841.500 atau 83,36% tersisa anggaran Rp. 2.563.500.

Program kegiatan ini meliputi pembiayaan Cetak, penggandaan dokumen, Belanja ATK, dan biaya makan minum rapat.

### 6.5. Program Penunjang Pemerintahan Umum

Program dengan anggaran sebesar Rp. 163.930.000 dengan realisasi Rp. 153.896.000 atau 93,88% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.034.000.

Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu :

#### 6.5.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Rencana anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.430.000 dengan realisasi Rp.126.396.000 atau 92,65% dengan sisa anggaran sebesar Rp.10.034.000.

Kegiatan ini meliputi belanja makan dan minum rapat serta membiayai administrasi dan honorarium dalam rangka melaksanakan kegiatan ini.

#### 6.5.2. Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan



Rencana anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 27.500.000 dengan realisasi Rp.27.500.000 atau 100%.

Kegiatan ini meliputi :

1. Biaya Dokumentasi dan Bahan Pajangan
2. Biaya Dekorasi Stand Pameran dan Panggung
3. Biaya sewa stand pameran pembangunan

#### 7. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Dalam mencapai sasaran 3 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Meskipun pencapaian pada sasaran ini sudah memenuhi target bahkan melebihi predikat yang ditargetkan namun demikian pencapaian tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat tentang penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan.
- Untuk itu perlu keikutsertaan aparat dalam pelatihan atau bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perlu terus ditingkatkan mengingat peraturan peraturannya terkait penyusunan tersebut terus menerus mengalami perubahan.

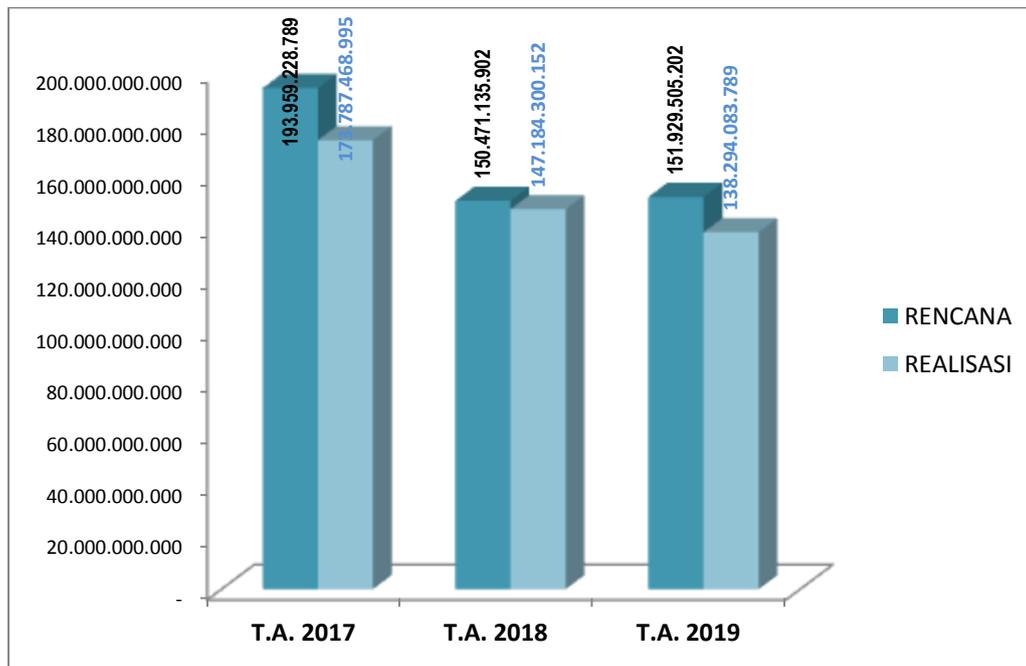
### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 154.523.168.787** atau 97,87%

**Tabel 3.22.** Rencana dan Realisasi Anggaran 2018 - 2019

NO	URAIAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.052.032.885	3.739.824.813	91,29	5.179.864.535	5.120.296.092	98,84%
2	Belanja Langsung	150.471.135.902	143.444.475.339	95,33	151.929.505.202	133.173.787.697	87,65%
J U M L A H		Rp 154.523.168.787	Rp 147.184.300.152	95,25%	157.109.369.737	138.294.083.789	88,024%

**Gambar 4** Diagram Rencana dan Realisasi Anggaran 3 Tahun Terakhir



## Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 3.23** Pendapatan Asli Daerah Dinas PU-PTR Kab. Bone Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH		Realisasi %
		Rencana	Realisasi	
1.	Hasil Retribusi Daerah	658.495.000	772.827.900	117,362
2.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.000.000	64.765.000	215,883
<b>Total</b>		688.495.000	837.592.900	121.655

**1. Permasalahan**

Beberapa hal yang menyebabkan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019.

- Tingkat kerusakan pada jaringan jalan/jembatan cukup tinggi.
- Belum mutakhirnya data base jalan/jemb atan
- Belum optimalnya aksesibilitas dan mobilitas pada daerah terpencil dan daerah perbatasan.
- Terbatasnya alokasi pendanaan pemerintah Kabupaten Bone dalam membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan/jembatan.
- Terbatasnya peralatan alat berat secara kuantitas dan kualitas.
- Permintaan pemakaian alat berat tidak sebanding dengan ketersediaan alat berat.
- Masih banyak wilayah Kabupaten belum memiliki rencana detail tata ruang.

**2. Solusi Permasalahan**

- Melaksanakan tufoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengoptimalkan anggaran secara efektif yaitu mengutamakan prioritas yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Selain itu mengupayakan bantuan Pemerintah pusat melalui program-program kementerian PU-PR yang ada.
- Mengalokasikan perencanaan anggaran lebih efektif pada program pemeliharaan jalan dan jembatan (rutin) yang bertujuan

mempertahankan kondisi jalan dan jembatan

- Melakukan pengadaan alat berat dengan mempertimbangkan jenis alat berat yang disesuaikan kebutuhan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Melakukan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial masyarakat serta perkembangan ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan perkapita meningkat. Selain itu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang diseluruh wilayah Kabupaten Bone.

### Permasalahan dan Solusi

- ♦ Belum Tersedianya Data Base Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal;
- ♦ Ketepatan Jangka Waktu Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP.
- ♦ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal;
- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal;
- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
- ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
- ♦ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan;

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

4. Perbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Bone. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan asset;
7. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan

TAHUN	JUMLAH
T.A. 2018	Rp. 122.286.625.000
T.A. 2019	Rp. 151.929.505.202
T.A. 2020	Rp. 85.155.664.000
T.A. 2021	-
T.A. 2022	-
T.A. 2023	-

## 3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 1

**Tabel 3.9.** Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN 2019	EFISIENSI
1	2	3	4	(3-4)
1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	-	20%	-
2	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	-	20%	-

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini belum dapat diukur dikarenakan capaian kinerja belum tersaji. Namun untuk anggaran yang mendukung pencapaian kinerja telah direalisasikan sebesar 20 persen.

## 6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 1

*Tabel 3.3.4*  
*Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 1*

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 807.741.400</b>	<b>805.514.157</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (Rekening)	Rp 130.320.000	129.481.603	<b>99%</b>
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (orang)	Rp 34.452.000	33.734.017	<b>98%</b>
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis, Orang)	Rp 14.203.000	14.203.000	<b>100%</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan (Media)	Rp 37.300.000	36.840.000	<b>99%</b>
	Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp 345.000.000	344.842.637	<b>100%</b>
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 246.466.400	246.412.900	<b>100%</b>

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp 5.261.930.000</b>	<b>252.736.354</b>	<b>5%</b>
	Pembangunan Gedung Kantor (Unit)	Rp 5.000.000.000	0	<b>0%</b>
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	Rp 81.400.000	81.400.000	<b>100%</b>
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)	Rp 137.480.000	128.286.354	<b>93%</b>
	Pemeliharaan Rutin,berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	Rp 43.050.000	43.050.000	<b>100%</b>
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp 91.159.000</b>	<b>90.909.000</b>	<b>100%</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)	Rp 22.125.000	22.125.000	<b>100%</b>
	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan (Kecamatan)	Rp 56.584.000	56.334.000	<b>100%</b>
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan (Orang)	Rp 12.450.000	12.450.000	<b>100%</b>
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>Rp 9.420.000</b>	<b>9.170.000</b>	<b>97%</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	Rp 9.420.000	9.170.000	<b>97%</b>
	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Rp 59.565.500</b>	<b>59.065.500</b>	<b>99%</b>
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Dokumen)	Rp 32.820.000	32.320.000	<b>98%</b>
	Pengelola Website Perangkat Daerah (Paket)	Rp 26.745.500	26.745.500	<b>100%</b>
		<b>Rp6.229.815.900</b>	<b>Rp1.217.395.011</b>	<b>20%</b>

Berdasarkan tabel diatas dari kelima program pada tabel diatas yang merupakan program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja Indikator sasaran ini adalah Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Penunjang Pemerintahan Umum dimana output dari kegiatan pada program ini adalah penyusunan laporan kinerja dan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah namun demikian selain program tersebut juga terdapat tiga program pendukung lainnya yang sangat berperan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Tujuan dari program ini adalah untuk Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait perizinan. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu Persentase masing masing indikator mencapai hampir rata rata mencapai 100%., kecuali pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang hanya terealisasi sebesar 4,80% hal ini disebabkan karena salah satu kegiatan dalam program tersebut tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan pembangunan gedung kantor, kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan karena terjadi perubahan lokasi pembangunan sehingga proses proses pembangunan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung keempat program ini adalah sebesar Rp.**Rp6.229.815.900**realisasi sebesar Rp.**Rp1.217.395.011**atau 20% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
5. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
6. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
7. Pembangunan Gedung Kantor
8. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9. Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
11. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
13. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan
14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
16. Pengelola Website Perangkat Daerah

### *7. Permasalahan dan Alternatif Solusi*

Meskipun pencapaian pada sasaran ini sudah memenuhi target bahkan melebihi predikat yang ditargetkan namun demikian pencapaian tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat tentang penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan.

Untuk itu perlu keikutsertaan aparat dalam pelatihan atau bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perlu terus ditingkatkan mengingat peraturan peraturan terkait penyusunan tersebut terus menerus mengalami perubahan.

## b. REALISASI ANGGARAN

### i. Realisasi Penerimaan

1. Retribusi Jasa Usaha	Rp. 154.400.000
2. Partisipasi Pihak Ke III	Rp. 20.210.00
3. Retribusi Penggunaan Gedung "Sao Deceng" di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 17.250.000
4. Retribusi Kekayaan Daerah	Rp. 37.460.000
<b>Total Jumlah</b>	<b>Rp. 191.860.000</b>

**Realisasi 65,64%**

Tidak terealisasi sesuai target rencana disebabkan penerimaan PAD bidang telekomunikasi belum bisa dilakukan karena regulasi Perda yang mengatur menara telekomunikasi belum disahkan dan masih sementara proses legislasi.

### ii. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 154.523.168.787** atau 97,87%

**Tabel 3.17. Rencana dan Realisasi Anggaran 2018**

NO	URAIAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 4.052.032.885	Rp 3.739.824.813	91,29
2	Belanja Langsung	Rp 150.471.135.902	Rp 143.444.475.339	95,33
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp 154.523.168.787</b>	<b>Rp 147.184.300.152</b>	<b>95,25</b>

### iii. Pemanfaatan Anggaran

- Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

#### 1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran belanja tidak langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.052.032.885 atau 91.39% yang di arahkan untuk :

- Gaji Tunjangan **Rp. 3.918.585.000**
- Gaji Pokok PNS / Uang Representasi **Rp. 2.935.787.100**
- Tunjangan Keluarga **Rp. 268.792.100**
- Tunjangan Jabatan **Rp. 228.090.400**
- Tunjangan Umum **Rp. 116.921.500**
- Tunjangan Beras **Rp. 174.674.000**
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus **Rp. 2.059.100**
- Pembulatan Gaji **Rp. 47.300**

#### 2. Belanja Langsung

Realisasi Anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 **Rp. 143.444.475.339** (95,33%)

### iv. Permasalahan Dan Solusi

#### 1. Permasalahan

Beberapa hal yang menyebabkan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018.

- Tingkat kerusakan pada jaringan jalan/jembatan cukup tinggi.
- Belum mutakhirnya data base jalan/jemb atan
- Belum optimalnya aksesibilitas dan mobilitas pada daerah terpencil dan daerah perbatasan.

- Terbatasnya alokasi pendanaan pemerintah Kabupaten Bone dalam membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan/jembatan.
- Terbatasnya peralatan alat berat secara kuantitas dan kualitas.
- Permintaan pemakaian alat berat tidak sebanding dengan ketersediaan alat berat.
- Masih banyak wilayah Kabupaten belum memiliki rencana detail tata ruang.

## **2. Solusi Permasalahan**

- Melaksanakan tufoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengoptimalkan anggaran secara efektif yaitu mengutamakan prioritas yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Selain itu mengupayakan bantuan Pemerintah pusat melalui program-program kementerian PU-PR yang ada.
- Mengalokasikan perencanaan anggaran lebih efektif pada program pemeliharaan jalan dan jembatan (rutin) yang bertujuan mempertahankan kondisi jalan dan jembatan
- Melakukan pengadaan alat berat dengan mempertimbangkan jenis alat berat yang disesuaikan kebutuhan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Melakukan perencanaan detail tata ruang sesuai kebutuhan yang mendesak khususnya kawasan utama dan penyangga.

### **c. Hal – Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan**

#### **i. Penghargaan yang diterima sejak Tahun 2013 – 2018**

- a. Forum Musrenbang Terbaik oleh Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2016
- b. Pengelola DAK Terbaik Pertama untuk Tahun Anggaran 2017 oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Forum Musrenbang Terbaik oleh Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2017
- d. Forum Musrenbang Terbaik oleh Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018

#### **ii. Penyiapan Dokumen Renstra untuk periode 2018 – 2023.**

Merujuk kepada Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023.

Dari hasil evaluasi dokumen perencanaan yang ada dan berdasarkan

permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

1. Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas
2. Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas.

**Tabel 3.18. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASE LINE DATA THN 2017	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
1	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	61,68	59,18%	60,16%	61,14%	62,12%	63,10%	64,08%
			Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	-	44,70%	45,34%	45,98%	46,62%	47,26%	47,26%
2	Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang	98,70%	97,80%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan	30,0%	30,00%	30,25%	30,50%	30,75%	31,00%	31,25%
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Dinas PU-PTR atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemendagri RB (BAIK)	CC	CC	B	B	BB	BB	A

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA dan RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 adalah Cukup Baik, karena ada 3 indikator tujuan kinerja utama, semua memenuhi targer kinerja tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke depan yaitu mempertahankan kondisi kemandapan jalan/jembatan dan menyelesaikan persoalan penataan ruang dalam bentuk ketetapan perda (berkekuatan hukum).

Bagi instansi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri, ini

bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Watampone, 02 Februari 2020

**KEPALA DINAS PU – PTR  
KABUPATEN BONE**



**H. ASKAR, S.ST, M.Si**

Pangkat : Pembina

N.I.P. : 19681231 199803 1 042













**DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN**

**PROVINSI** : SULAWESI SELATAN  
**KABUPATEN** : BONE  
**TAHUN** : 2019

NO.	Nama Jembatan	No. Ruas	Nama Ruas	Kec.	Dimensi			Bangunan Atas						Bangunan Bawah								
					Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang	Struktur Bangunan Atas		Lantai		Sandaran		Pondasi			Kepala Jembatan			Pilar		
								Type	Kondisi	Bahan	Kondisi	Bahan	Kondisi	Type	Bahan	Kondisi	Type	Bahan	Kondisi	Type	Bahan	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
254	S. Desa Bontomasunggu		Jalan Desa	Tellu LimpoE	40,00																	
255	S. Laduajeng Desa Tapong		Jalan Desa	Tellu LimpoE	40,00																	
	Sub Jumlah VII					80,00																
	Sub Jumlah I+II+III+IV+V+VI+VII					4930,50																

Kondisi Mantap = Baik + Sedang = **48,12** %  
 Panjang Jembatan Kabupaten dalam kondisi Mantap **2.372,70** M  
 Panjang Jembatan Kabupaten dalam kondisi Rusak Ringan **66,80** M  
 Panjang Jembatan Kabupaten dalam kondisi Rusak Berat **2.485,00** M

**KEPALA SEKSI PERENCANAAN  
 DINAS PU & PENATAAN RUANG**

**KEPALA BIDANG BINA TEKNIK & JASA KONSTRUKSI  
 DINAS PU & PENATAAN RUANG**

**ANDI SYAMSUL RIJAL,ST**  
 NIP. 197209052009041001

**JUMRAN ,ST.MT**  
 NIP. 197404052005021001

DATA DASAR PRASARANA JALAN PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
 KABUPATEN : BONE  
 TAHUN : 2019

DD - 1

Hal. 1 dari 13

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan	
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			N/P/K	Ket
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		Waempubbu-Pompanua	Amali-Ajangale	22,695	4,00	100,00		-		22,695	100,00	-	-	15	16	17	18	19	N	JP
2		Taccipi- Waempubbu	Ulaweng/Amali	15,500	4,00	100,00				7,00	45,16	4,00	25,81	4,50	29,03	-	-		N	JP
3		Koppe - Waempubbu	Bengo, Amali	23,000	4,00	100,00				9,00	39,13	5,00	21,74	4,00	17,39	5,00	21,74		N	JP
4		Jalan Poros Sinjai-Bojo	Kajuara	0,823	8,00	100,00		-		0,823	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JN
5		Jalan Poros Bojo-Ujung Lamuru		80,976	6,00	100,00		-		80,976	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JN
6		Jalan Poros Bojo-Bone		73,328	6,00	100,00		-		60,828	82,95	7,50	10,23	5,00	6,82	-	-		N	JN
7		Jalan Poros Ujung Lamuru-Bone		54,554	8,00	100,00		-		54,554	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JN
8		Jalan Poros Bone-BajoE	T.Riattang/T.R.Timur	6,042	10,00	100,00		-		6,042	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JN
9		Poros Ujung Lamuru-Takkalala		19,174	6,00	100,00		-		19,174	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JN
10		Poros Salaonro-Pompanua		10,503	8,00	100,00		-		10,503	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JP
11		Jalan Poros Watampone-Pompanua		49,552	6,00	100,00		-		49,552	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JN
12		Ibukota Kec-Kahu	Kahu	0,138	6,00	100,00		-		0,138	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JN
13		Poros Maros-Ujung Lamuru		22,918	8,00	100,00		-		22,918	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JN
14		Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo	T.R.Barat	2,500	5,00	100,00		-		2,29	91,60			0,21	8,40				N	JP
15		Pappolo-Mattirowalie	T.R.Barat-T.R.Timur	4,068	15,00	53,00		47,00		2,60	63,91			0,70	17,21	0,77	18,88		N	JP
16		Jl. Letjen M.T. Haryono	T.Riattang	4,340	6,00	100,00		-		4,340	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JN
17		Papolo-Panyula	T.R.Timur	2,108	4,00	100,00				1,700	80,65	0,20	9,49	0,21	9,87				N	JP
18		Jl. Laksamana Yos Sudarso	T.R.Timur	4,870	8,00	100,00		-		4,870	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JN
19		Watampone-Palette	T.R.Timur	0,320	6,00	100,00				0,320	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JP
20		Jl. Jendral Urip Sumoharjo	T.R.Barat	4,900	6,00	100,00		-		4,900	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JP
21		Jl. Jendral Gatot Subroto	T.Riattang	2,290	6,00	100,00		-		2,290	100,00	-	-	-	-	-	-		N	JP
22		Panyula-Toro	T.R.Timur	1,900	4,00	100,00				1,200	63,16	-	-	0,70	36,84				N	JP
23		Jl. Sungai Berantas	T.R.Timur	2,111	8,00	100,00				1,500	71,06	0,30	14,21	0,31	14,73				N	JP
24		Jl. A. Celleng	T.R.Timur	2,050	8,00	100,00				0,740	36,10	0,53	25,85	0,43	20,98	0,35	17,07		N	JP
25		Jl. K. H. Abu Hamid	T.Riattang	2,500	3,00	100,00				2,500	100,00			-	-	-	-		N	JP
26		Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri	T.R.Barat	1,345	6,00	100,00				1,345	100,00			-	-	-	-		N	JP
27		Jl.HOS.Cokroaminoto	T.R.Barat	1,360	6,00	100,00		-		1,36	100,00			-	-	-	-		N	JP
<b>Sub Jumlah</b>				<b>415,865</b>						<b>90,45</b>		<b>4,22</b>		<b>3,86</b>		<b>1,47</b>				



DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN

DD - 1

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN : BONE  
TAHUN : 2019

Hal. 3 dari 13

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan	
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			N/P/K	Ket
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	32	Nusa-Bendungan-Patiangi	Salomekko-Patimpeng	13,383	4,00	40,77		59,23	-	5,456	40,77	4,970	37,14			2,957	22,10		N/K	
15	33	Bellu-Pasaka	Salomekko-Kajuara	5,446	4,00	27,54		72,46		1,500	27,54	1,820	33,42			2,126	39,04		N/K	
16	34	<b>IKK Tonra</b>	Tonra	4,778	4,00	100,00				4,586	95,98	0,192	4,02			-	-		N/K	
17	35	Bulu-Bulu-Bone Lampe	Tonra	3,578	4,00	100,00				1,500	41,92	2,078	58,08			-	-		N/K	
18	36	Gareccing-Kessi Pute	Tonra	3,454	4,00	100,00				1,500	43,43	0,700	20,27			1,254	36,31		N/K	
19	37	Muara-Ujung	Tonra	4,100	4,00	100,00						1,500	36,59	1,200	29,27	1,400	34,15		N/K	
20	38	Lempong-Jompie	Tonra	3,250	4,00	46,12	50,43	3,42		3,138	96,55					0,112	3,45		N/K	
21	39	Libureng-Talabangi	Tonra-Patimpeng	8,500	4,00	35,29		64,71				4,500	52,94	2,300	27,06	1,700	20,00		N/K	
22	40	<b>IKK Patimpeng</b>	Patimpeng	1,634	4,00	100,00				0,798	48,84					0,836	51,16		N/K	
23	41	<i>Patimpeng-Gattareng</i>	Patimpeng	7,200	4,00	31,93	1,31	66,76		4,485	62,29	1,000	13,89	1,715	23,82				K	
24	42	Masago-Patimpeng	Patimpeng-Kahu	6,245	4,00	100,00				2,403	38,48	3,842	61,52			-	-		K	
25	43	Paccing-Massila	Patimpeng	7,319	4,00	9,02		90,98		0,660	9,02	3,570	48,78			3,089	42,21		K	
26	44	Paccing-Talabangi	Patimpeng	6,500	4,00	13,85		86,15		0,500	7,69	0,400	6,15	5,600	86,15				K	
27	45	Masago-Hulo	Patimpeng	4,500	4,00	100,00						4,500	100,00			-	-		K	
28	46	Patimpeng-Maddanrengpulu	Patimpeng	8,000	4,00	35,00		65,00		2,000	25,00	3,000	37,50	1,800	22,50	1,200	15,00		K	
29	47	Batulappa-Massila	Patimpeng	2,243	4,00	100,00										2,243	100,00		K	
30	48	<b>IKK Libureng</b>	Libureng'	1,889	4,00	84,01			15,99	1,587	84,01					0,302	15,99		N/K	
31	49	Camming-Bune - Talumae	Libureng'	13,414	4,00	100,00				5,000	37,27	5,070	37,80	1,757	13,10	1,587	11,83		N/K	
32	50	Swadaya-Bune	Libureng'	5,682	4,00	45,11		54,89		2,986	52,55	1,000	17,60			1,696	29,85		N/K	
33	51	Samaenre-Tompongapatu	Libureng	6,440	4,00	100,00				4,782	74,25	1,199	18,62	0,459	7,13				P/K	
34	52	Laburasseng-Tappale	Libureng	7,200	4,00	22,48		77,52		1,500	20,83	3,200	44,44			2,500	34,72		P/K	
35	53	Tinco-Lappakanrung	Libureng	5,493	4,00	20,95	20,95	58,10		1,152	20,97	2,300	41,87			2,041	37,16		P/K	
36	54	Batu macenno-Lappagalung	Libureng	15,000	4,00			100,00				2,000	13,33	3,700	24,67	9,300	62,00		K	
37	55	Polewali-Paccing	Libureng-Patimpeng	6,000	4,00	25,33		74,67		1,520	25,33	2,600	43,33			1,880	31,33		P/K	
38	56	<b>IKK Mare</b>	Mare	7,308	4,00	74,38			25,63	5,435	74,37					1,873	25,63		N/K	
39	57	Kadai-Batu Gading	Mare	7,710	4,00	49,96			50,04	3,000	38,91					4,710	61,09		N/K	
40	58	Kadai-Patiro Bajo	Mare-Sibulue	16,629	4,00	74,35			25,65	4,703	28,28	4,500	27,06	2,300	13,83	5,126	30,83		N/K	
41	59	Tellongeng-Sanrego	Mare	4,120	4,00	100,00				2,700	65,53	0,500	12,14	0,920	22,33				N/K	
42	60	Appalaringeng-Leteng PatuE	Mare	2,434	4,00			100,00				1,934	79,46			0,500	20,54		N/K	
<b>Sub Jumlah</b>				<b>189,449</b>				<b>102,71</b>		<b>73,56</b>	<b>10,299</b>	<b>33,20</b>		<b>29,76</b>		<b>11,48</b>	<b>25,56</b>			

**DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN**

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
 KABUPATEN : BONE  
 TAHUN : 2019

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan	Ket
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
43	61	Masumpu-Ujung Salangketo	Mare	5,007	4,00	-	3,79	96,21	-	0,190	3,79	3,700	73,90	1,117	22,31	-	-	-	-	K
44	62	Leange-Masumpu	Mare	6,560	4,00	100,00	-	-	-	1,500	22,87	3,160	48,17	0,900	13,72	1,000	15,24	-	-	N/K
45	63	Lapasa-Batugading	Mare	5,200	4,00	-	4,08	95,94	-	0,212	4,08	2,800	53,85	1,368	26,31	0,820	15,77	-	-	N/K
46	64	Lapasa-Rappa	Mare-Tontra	3,500	4,00	-	-	100,00	-	-	-	2,500	71,43	-	-	1,000	28,57	-	-	N/K
47	65	<b>IKK Sibulue</b>	Sibulue	2,500	4,00	100,00	-	-	-	2,500	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	N/K
48	66	Mabbiring-Mallusetasi	Sibulue	8,771	4,00	15,49	4,14	80,37	-	1,722	19,63	3,500	39,90	-	-	3,549	40,46	-	-	K
49	67	Pattiro Bajo-Cappaujung	Sibulue	11,109	4,00	87,04	12,96	-	-	6,710	60,40	2,100	18,90	-	-	2,299	20,69	-	-	K
50	68	Calo-Buareng	Sibulue	5,776	4,00	34,78	-	65,22	-	2,009	34,78	2,150	37,22	-	-	1,617	28,00	-	-	K
51	69	Pattiroriolo-Benteng	Sibulue	4,200	4,00	-	-	100,00	-	1,200	28,57	2,300	54,76	-	-	0,700	16,67	-	-	K
52	70	<b>IKK Cina</b>	Cina	1,250	4,00	100,00	-	-	-	1,250	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	N/K
53	71	Kawerang-Pattiro Bajo	Cina-Sibulue	8,272	4,00	57,18	-	42,82	-	-	-	4,394	53,12	2,336	28,24	1,542	18,64	-	-	N/K
54	72	Lerang-Salampe	Cina-ponre	8,020	4,00	31,43	1,21	67,36	-	4,200	52,37	1,400	17,46	-	-	2,420	30,17	-	-	N/K
55	73	Lapeccang-Lonrong	Cina-Ponre	17,205	4,00	100,00	-	-	-	13,871	80,62	3,334	19,38	-	-	-	-	-	-	N/K
56	74	Teko-Kaju	Cina-Sibulue	10,172	4,00	84,27	-	15,73	-	5,872	57,73	-	-	2,700	26,54	1,600	15,73	-	-	N/K
57	75	Keling-Ajangpulu	Cina	6,206	4,00	67,35	-	32,65	-	-	-	5,100	82,18	-	-	1,106	17,82	-	-	K
58	76	Tanete-Lompu	Cina	2,035	4,00	100,00	-	-	-	2,035	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	N/K
59	77	Ajangpulu-Kanco	Cina	4,000	4,00	-	-	100,00	-	-	-	4,000	100,00	-	-	-	-	-	-	K
60	78	Tanete-Panasa	Cina	5,000	4,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	5,000	100,00	-	-	N/K
61	79	<b>IKK Barebbo</b>	Barebbo	1,120	4,00	100,00	-	-	-	1,120	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	N/K
62	80	Lemoape-Lampoko	Barebbo	3,822	4,00	-	-	100,00	-	-	-	1,800	47,10	-	-	2,022	52,90	-	-	K
63	81	Apala-Kampuno	Barebbo	3,182	4,00	100,00	-	-	-	0,950	29,86	2,000	62,85	-	-	0,232	7,29	-	-	N/K
64	82	Apala-Panyili	Barebbo-Palakka	11,044	4,00	100,00	-	-	-	2,200	19,92	6,844	61,97	2,000	18,11	-	-	-	-	N/K
65	83	Galung-Kajuara	Barebbo-Sibulue	14,490	4,00	100,00	-	-	-	2,635	18,18	6,478	44,71	0,877	6,05	4,500	31,06	-	-	K
66	84	Lapeccang-Pattiro Bajo	Barebbo-Sibulue	8,264	4,00	100,00	-	-	-	3,109	37,62	2,200	26,62	-	-	2,955	35,76	-	-	N/K
67	85	Lampoko-Wollangi	Barebbo-Palakka	3,205	4,00	-	-	100,00	-	-	-	1,000	31,20	-	-	2,205	68,80	-	-	K
68	86	Bacu-Cinennung	Barebbo-Palakka	5,586	4,00	46,54	-	53,46	-	2,600	46,54	-	-	2,986	53,46	-	-	-	-	K
69	87	Lampoko-Bacu	Barebbo	2,227	4,00	100,00	-	-	-	2,227	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	K
70	88	Cingkang-Bacu	Barebbo	3,000	4,00	-	-	100,00	-	-	-	3,000	100,00	-	-	-	-	-	-	K
71	89	<b>IKK Ponre</b>	Ponre	1,250	4,00	-	-	100,00	-	1,250	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	K
<b>Sub Jumlah</b>				<b>171,973</b>		<b>105,52</b>		<b>64,16</b>	<b>-</b>	<b>34,52</b>		<b>37,08</b>		<b>8,31</b>		<b>20,10</b>				

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN

DD - 1

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
 KABUPATEN : BONE  
 TAHUN : 2019

Hal. 5 dari 13

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan		
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			N/P/K	Ket	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
72	90	Ciro - Salebba	Ponre	4,500	4,00	-	-	100,00	-	-	-	4,500	100,00	-	-	-	-	-	-	K	
73	91	Pattimpa-Mattampae	Ponre	4,000	4,00	-	24,85	75,15	-	0,994	24,85	3,006	75,15	-	-	-	-	-	-	K	
74	92	Bakunge-Cakkewatu	Ponre	3,153	4,00	100,00	-	-	-	3,153	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	N/K	
75	93	Bakunge-Lonrong	Ponre	27,500	4,00	91,64	-	8,36	-	25,200	91,64	-	-	-	-	2,300	8,36	-	-	N/K	
76	94	Dekko-Tellang	Ponre	3,446	4,00	-	-	100,00	-	-	-	3,446	100,00	-	-	-	-	-	-	N/K	
77	95	Cinnongge-Patirongge	Ponre-Libureng	9,251	4,00	-	-	100,00	-	-	-	7,150	77,29	-	-	2,101	22,71	-	-	N/K	
78	96	<b>IKK Lapparija</b>	Lapri	4,300	4,00	100,00	-	-	-	2,00	46,51	-	-	-	-	2,30	53,49	-	-	N/K	
79	97	Salo SawaE-TujuE	Lapri-Tellulimpo	16,572	4,00	98,04	1,27	0,69	-	13,869	83,69	-	-	2,703	16,31	-	-	-	-	N/K	
80	98	Sampie-WaekecceE	Lapri	5,100	4,00	100,00	-	0,00	-	1,17	22,96	-	-	1,791	35,12	2,138	41,92	-	-	N/K	
81	99	Lagori-SengengpaliE	Lapri-lamuru	18,065	4,00	27,68	-	72,32	-	3,00	16,61	3,70	20,48	-	-	11,37	62,91	-	-	K	
82	100	SampiE-Larumange	Lapri	6,248	4,00	100,00	-	-	-	3,10	49,62	3,15	50,38	-	-	-	-	-	-	N/K	
83	101	Arokke-Tompong	Lapri-Tellulimpo	15,250	4,00	9,18	3,28	7,21	80,33	0,60	3,93	2,40	15,74	8,20	53,77	4,05	26,56	-	-	K	
84	102	Sampie-Samaenre(bts.Barru)	Lapri-Tellulimpo	17,786	4,00	5,62	-	94,38	-	1,00	5,62	8,70	48,91	-	-	8,09	45,46	-	-	N/K	
85	103	PekkaE Larumange-Waekecce	Lapri	9,273	4,00	12,10	-	87,89	-	1,00	10,78	3,50	37,74	1,12	12,10	3,65	39,37	-	-	K	
86	104	<b>IKK Lamuru</b>	Lamuru	1,530	4,00	100,00	-	-	-	1,53	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	N/K	
87	105	Poleonro-BarakkaE	Lamuru	2,179	4,00	58,74	-	41,26	-	1,28	58,70	-	-	-	-	0,90	41,30	-	-	N/K	
88	106	Laleng Bata-Batu BuajaE	Lamuru	9,550	4,00	45,00	-	55,00	-	4,30	45,03	3,90	40,84	0,58	6,07	0,77	8,06	-	-	N/K	
89	107	JampuE-Palakka	Lamuru	7,104	4,00	14,08	-	85,92	-	1,50	21,11	1,20	16,89	-	-	4,40	61,99	-	-	N/K	
90	108	MaminasaE-Lawaseri	Lamuru	5,680	4,00	85,00	-	15,00	-	-	-	3,78	66,55	-	-	1,90	33,45	-	-	N/K	
91	109	Allemponge-Mampawa	Lamuru	2,941	4,00	-	-	100,00	-	-	-	1,18	40,00	-	-	1,76	60,00	-	-	N/K	
92	110	Mutiara-Waemputang	Lamuru	4,909	4,00	-	-	100,00	-	-	-	4,91	100,00	-	-	-	-	-	-	N/K	
93	111	<b>IKK Tellulimpo</b>	Tellulimpo	2,100	4,00	-	100,00	-	-	2,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	N/K	
94	112	TujuE-Samaenre	Tellulimpo	11,644	4,00	-	-	100,00	-	-	-	7,60	65,27	-	-	4,04	34,73	-	-	K	
95	113	Tondong-Buah	Tellulimpo	8,297	4,00	24,11	-	75,89	-	-	-	2,00	24,11	-	-	6,30	75,89	-	-	K	
96	114	Buhudua-Sadar	Tellulimpo	6,000	4,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	100,00	-	-	K	
97	115	TujuE-Tapong	Tellulimpo	9,741	4,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	1,31	13,40	8,44	86,60	-	-	K	
98	116	<b>IKK Bengo</b>	Bengo	1,730	4,00	52,00	-	48,00	-	-	-	1,73	100,00	-	-	-	-	-	-	N/K	
<b>Sub Jumlah</b>				<b>217,849</b>			<b>84,61</b>		<b>117,19</b>	<b>12,250</b>	<b>30,20</b>		<b>30,23</b>		<b>7,21</b>		<b>32,36</b>				

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN

DD - 1

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
 KABUPATEN : BONE  
 TAHUN : 2019

Hal. 6 dari 13

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan	Ket
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
99	117	Koppe-Mutiara	Bengo-Lamuru	13,374	4,00	70,00		30,00		5,83	43,58	2,81	21,03	1,73	12,95	3,00	22,43		N/K	
100	118	Malaka-Balubu	Bengo	8,685	4,00	100,00				8,69	100,00	-	-	-	-	-	-		N/K	
101	119	Bengo-Taka-Malaka	Bengo	12,440	4,00	4,02		95,98		0,50	4,02	2,21	17,77	0,60	4,78	9,14	73,43		N/K	
102	120	Selli-Nyappareng	Bengo	2,718	4,00	-		100,00			-	-	-	-	-	2,72	100,00		N/K	
103	121	Selli-Coppo Bulu	Bengo	5,140	4,00	-		100,00			-	5,14	100,00	-	-	-	-		N/K	
104	122	Lappacnrana-Bulu	Bengo	3,714	4,00	65,00		35,00		-	-	-	-	-	-	3,71	100,00		N/K	
105	123	Tungke-Coppo Bulu	Bengo	6,141	4,00	-		100,00			-	-	-	-	-	6,14	100,00		N/K	
106	124	<b>IKK Ulaweng</b>	Ulaweng	7,226	4,00	85,00		15,00		2,54	35,12	0,96	13,31	0,30	4,15	3,83	52,95		N/K	
107	125	Tacipi-Tokaseng	Ulaweng/Tellusiattinge	21,257	4,00	100,00		-		9,70	45,63	5,42	25,51	6,14	28,86	-	-		N/K	
108	126	AkaE-Pallawarukka	Ulaweng	1,080	4,00	100,00		-			-	-	-	-	-	1,08	100,00		N/K	
109	127	PenreE-Kajuara	Ulaweng	1,395	4,00	100,00		-		0,63	45,38	-	-	-	-	0,76	54,62		N/K	
110	128	Cani Sirenreng-Bukku	Ulaweng	4,413	4,00	-		100,00			-	-	-	-	-	4,41	100,00		K	
111	129	Lilina Ajangale-Alinge	Ulaweng	5,468	4,00	100,00		-		4,20	76,83	-	-	-	-	1,27	23,17		N/K	
112	130	Sura-Lamedde	Ulaweng	6,233	4,00	16,04		83,96		2,71	43,51	-	-	2,21	35,49	1,31	21,00		N/K	
113	131	SappewaliE-Puderebbae	Ulaweng	12,584	4,00	35,00		65,00		3,75	29,79	-	-	2,14	16,97	6,70	53,24		K	
114	132	PenreE-Bukku	Ulaweng	2,032	4,00	-		100,00			-	-	-	0,57	27,81	1,47	72,19		N/K	
115	133	Akae-Tajong	Ulaweng/Tellusiattinge	8,854	4,00	25,98		74,02		2,30	25,98	-	-	6,55	74,02	-	-		N/K	
116	134	Kacimpang-Tajong	Ulaweng	3,829	4,00	100,00		-		2,83	73,88	1,00	26,12	-	-	-	-		N/K	
117	135	Tajong -Padaidi	Ulaweng/Tellusiattinge	4,200	4,00	-		100,00		2,70	64,29	0,50	11,90	1,00	23,81	-	-		K	
118	136	Cani Sirenreng-Baruttunge-Siame	Ulaweng-Palakka	9,624	4,00	31,17		68,83		6,12	63,63	2,50	25,98	1,00	10,39	-	-		N/K	
119	137	Ningo - Telluboccoe	Ulaweng-Ponre	17,000	4,00	-		100,00		7,50	44,12	3,00	17,65	4,00	23,53	2,50	14,71		N/K	
120	138	<b>IKK Palakka</b>	Palakka	0,520	4,00	100,00		-		0,52	100,00	-	-	-	-	-	-		N/K	
121	139	Ureng-Lonrong	Palakka-ponre	24,376	4,00	45,00		55,00		8,76	35,95	-	-	-	-	15,61	64,05		N/K	
122	140	Passippo-Lattekko	Palakka-Awangpone	6,998	4,00	-		100,00		1,00	14,29	3,00	42,87	3,00	42,84	-	-		N/K	
123	141	Usa-Cumpiga	Palakka-Awangpone	8,066	4,00	65,29		34,71		1,80	22,32	0,27	3,30	3,20	39,67	2,80	34,71		N/K	
124	142	Usa-Congko	Palakka-Barebbo	5,778	4,00	51,92		48,08		3,00	51,92	-	-	-	-	2,78	48,08		N/K	
125	143	Passipo-Mico	Palakka	4,313	4,00	42,00		58,00		2,96	68,61	-	-	-	-	1,35	31,39		N/K	
<b>Sub Jumlah</b>				<b>207,458</b>		<b>92,40</b>		<b>115,05</b>	<b>-</b>	<b>37,62</b>		<b>12,92</b>		<b>15,63</b>		<b>34,02</b>				

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN

DD - 1

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN : BONE  
TAHUN : 2019

Hal. 7 dari 13

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan		
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			N/P/K	Ket	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
126	144	Tanah Tenga-Lemoape	Palakka	5,288	4,00	15,00		85,00		1,50	28,42		-			3,79	71,58			K	
127	145	Bainang - Passippo	Palakka	7,500	4,00	29,61		70,39		2,22	29,61		-		5,28	70,39				K	
128	146	Tanah Tenga-TPA	Palakka	0,700	4,00	100,00		-			-	0,70	100,00	-	-		-			K	
129	147	<b>IKK Awangpone</b>	Awangpone	4,600	4,00	50,00		50,00		0,68	14,87	3,92	85,13	-	-	-	-			K	
130	148	Pacing-Matiro WaliE	Awangpone-T.Siattinge	10,789	4,00	79,61		20,39			-	8,57	79,45	-	-	2,22	20,55			K	
131	149	Cakke Bone-Unra	Awangpone	3,504	4,00	28,54		71,46		-	-	1,71	48,92	0,80	22,75	0,99	28,34			K	
132	150	Maccope-Kading	Awangpone	4,000	4,00	-		100,00		-	-	2,00	50,00	-	-	2,00	50,00			K	
133	151	Carebbu-Lanca	Awangpone-T.Siattinge	5,468	4,00	36,58		63,42		1,00	18,29	-	-	0,50	9,14	3,97	72,57			K	
134	152	Comonge-Kajuara	Awangpone	5,955	4,00	100,00		-		1,40	23,49	2,22	37,23	-	-	2,34	39,28			K	
135	153	Lapuse-Lamurukung	Awangpone-T.Siattinge	7,173	4,00	100,00		-		5,77	80,48	1,40	19,52	-	-	-	-			K	
136	154	<b>IKK Tellusiattinge</b>	Tellusiattinge	1,500	4,00	50,00		50,00		0,64	42,80		-		0,86	57,20				K	
137	155	Tokaseng-Pacubbe	Tellusiattinge/Cenrana	6,308	4,00	100,00		-		3,50	55,49	0,80	12,68	1,50	23,78	0,51	8,05			K	
138	156	Lanca-Prajamaju	Tellusiattinge/Ajangale	5,488	4,00	-		100,00		-	-	-	-	-	-	5,49	100,00			K	
139	157	Makitta-Turungeng	Tellusiattinge	7,055	4,00	43,00		57,00			-		-		7,06	100,00				K	
140	158	Beli-Lamurukung	Tellusiattinge	6,090	4,00	100,00		-		1,72	28,23	-	-	4,37	71,77		-			K	
141	159	Lamurukung-Cenrana	tellusiattinge-cenrana	8,678	4,00	100,00		-		6,68	76,95	1,00	11,52	1,00	11,52	-	-			K	
142	160	Lanca-Mampu	Tellusiattinge/Duaboccoe	7,141	4,00	67,00		33,00			-	2,29	32,12	1,49	20,84	3,36	47,04			K	
143	161	Ajalreng-Watu	Tellusiattinge-cenrana	6,792	4,00	100,00		-		1,45	21,36		-	4,76	70,13	0,58	8,51			K	
144	162	<b>IKK Amali</b>	Amali	3,520	4,00	86,00		14,00		2,00	56,82	-	-	0,90	25,57	0,62	17,61			K	
145	163	Tobenteng-Citta	Amali	4,737	4,00	38,00		62,00			-	2,58	54,49	-	-	2,16	45,51			K	
146	164	Taretta-Bila	Amali	6,431	4,00	100,00		-		1,79	27,85	-	-	-	-	4,64	72,15			K	
147	165	MattaropuraE-Tobenteng	Amali	5,270	4,00	-		100,00			-	0,72	13,57	-	-	4,56	86,43			K	
148	166	Bila-Kalakkang	Amali	4,469	4,00	-		100,00		1,47	32,87	1,00	22,38	2,00	44,75		-			K	
149	167	Wellulang-Ulo	Amali-Tellusiattinge	10,162	4,00	17,00		83,00		2,00	19,68	-	-	0,90	8,86	7,26	71,46			K	
150	168	Laponrong-Benteng TelluE	Amali	4,509	4,00	-		100,00		-	-	-	-	-	-	4,51	100,00			K	
151	169	Laponrong-Lallatang	Amali/Duaboccoe	4,000	4,00			100,00		1,00	25,00	1,00	25,00	2,00	50,00	-	-			K	
152	170	<b>IKK-Ajangale</b>	Ajangale	5,202	4,00	38,49	61,51	-		3,20	61,51	1,70	32,68	0,30	5,81	-	-			K	
153	171	Welado-Opo	Ajangale	6,474	4,00	100,00		-		2,87	44,39	2,00	30,89	1,60	24,71	-	-			K	
154	172	Telle-Taretta	Ajangale-Amali	17,794	4,00	35,93	64,07	-		8,79	49,42	6,60	37,09	2,40	13,49	-	-			K	
155	173	Telle-Timurung	Ajangale	5,035	4,00	100,00		-			-	1,07	21,31		-	3,96	78,69			K	
<b>Sub Jumlah</b>				<b>181,632</b>		<b>100,06</b>		<b>66,97</b>	<b>-</b>	<b>27,362</b>		<b>22,73</b>		<b>13,50</b>		<b>36,41</b>					

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
TAHUN : 2019

DD - 1

Hal. 8 dari 13

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan N/P/K	Ket	
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat					
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
156	174	LebbaE-Benteng TelluE	Ajangale-Amali	3,989	4,00	-	-	100,00	-	0,14	3,53	-	-	-	-	3,85	96,47	-	-	K	
157	175	Pompanua-BiringpalanaE	Ajangale	1,186	4,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	1,19	100,00	-	-	-	-	K	
158	176	<b>IKK Dua BoccoE</b>	Duaboccoe	5,791	4,00	85,00	-	15,00	-	3,52	60,75	-	-	0,57	9,77	1,71	29,48	-	-	K	
159	177	Pakkasalo-Mario	Duaboccoe-T.Siattinge	15,546	4,00	35,00	-	65,00	-	-	-	3,50	22,51	3,06	19,70	8,98	57,78	-	-	K	
160	178	Pakkasalo-Pallime	Duaboccoe-Cenrana	14,931	4,00	60,00	40,00	-	-	4,20	28,13	5,10	34,16	1,00	6,70	4,63	31,02	-	-	K	
161	179	UloE-Timurung	Duaboccoe-Ajangale	11,452	4,00	30,14	26,20	43,66	-	1,50	13,10	4,58	39,98	-	-	5,37	46,93	-	-	K	
162	180	UloE-Ujung	Duaboccoe	3,500	4,00	30,00	70,00	-	-	1,01	28,89	1,83	52,34	0,66	18,77	-	-	-	-	K	
163	181	Sailong-Lallatang	Duaboccoe	7,000	4,00	-	-	100,00	-	1,15	16,43	-	-	-	-	5,85	83,57	-	-	K	
164	182	Pattiro Mampa-Lacori	Duaboccoe	2,601	4,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,48	18,42	2,12	81,58	-	-	K	
165	183	Panyili-Lallatang	Duaboccoe	1,400	4,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	1,40	100,00	-	-	K	
166	184	<b>IKK Cenrana</b>	Cenrana	4,100	4,00	67,00	-	33,00	-	1,00	24,39	0,50	12,20	2,60	63,41	-	-	-	-	K	
167	185	Cenrana-Labotto (Bts.Wajo)	Cenrana	18,616	4,00	-	26,67	73,33	-	7,00	37,60	2,62	14,05	-	-	9,00	48,35	-	-	K	
168	186	PallaE-Watu	Cenrana	4,085	4,00	36,72	-	63,28	-	1,50	36,72	-	-	-	-	2,59	63,28	-	-	K	
169	187	Awangcenrana-Lebonge	Cenrana	5,500	4,00	-	-	100,00	-	-	-	3,00	54,55	-	-	2,50	45,45	-	-	K	
170	400	<b>Ibu Kota Kec.T.R.Barat</b>	T.R.Barat	2,200	4,00	42,00	-	58,00	-	-	-	-	-	0,10	4,36	2,10	95,64	-	-	K	
171	401	Majang-Laliddong	T.R.Barat/Barebbo	5,789	4,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	5,79	100,00	-	-	-	-	K	
172	402	PabbacuE-Lonrong	T.R.Barat/Barebbo/Palakka/Ponre	21,669	4,00	100,00	-	-	-	5,00	23,07	15,17	70,00	1,50	6,92	-	-	-	-	K	
173	403	WaruE-Tirong	T.R.Barat	1,791	4,00	100,00	-	-	-	1,79	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	K	
174	404	WaruE - Cirowali	T.R.Barat	2,500	4,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	100,00	-	-	K	
175	405	Wattang Palakka-Cirowali	T.R.Barat	1,307	4,00	-	-	100,00	-	0,44	33,28	-	-	0,33	25,48	0,54	41,24	-	-	K	
176	406	Cabalu-Pinra	T.R.Barat	0,523	4,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,52	100,00	-	-	-	-	K	
177	407	Polewali-Kasumpureng	T.R.Barat	1,300	4,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	1,30	100,00	-	-	K	
178	408	Lattekko-Barang	T.R.Barat	2,500	4,00	-	-	100,00	-	1,53	61,28	-	-	-	-	0,97	38,72	-	-	K	
179	409	Jl.A.Yani - Jl.Langsat-Bk. Bosowa	T.R.Barat	0,380	4,00	85,00	-	15,00	-	0,38	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	K	
180	410	PabbacuE-Cabalu	T.R.Barat	3,450	4,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	3,45	100,00	-	-	-	-	K	
181	411	Welalange-Labekku	T.R.Barat	1,885	4,00	100,00	-	-	-	1,885	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	K	
182	412	Jl.H.A.Mappanyukki	T.R.Barat	0,433	4,00	100,00	-	-	-	0,43	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	K	
<b>Sub Jumlah</b>				<b>145,424</b>		<b>69,96</b>		<b>59,08</b>	-	<b>22,33</b>		<b>24,96</b>		<b>14,61</b>		<b>38,10</b>					

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
TAHUN : 2019

DD - 1

Hal 9 dari 13

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan	
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			N/P/K	Ket
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
183	413	Jl. Letjen Suprpto	T.R.Barat	0,250	12,70	100,00				0,250	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
184	414	Jl. Ade Irma Nasution	T.R.Barat	0,109	7,00	100,00				0,109	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
185	415	Jl. Arief Rahman Hakim	T.R.Barat	0,480	7,70	100,00				0,480	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
186	416	Jl. Aiptu K. S. Tubun	T.R.Barat	0,175	12,00	100,00				-	-	-	-	0,18	100,00	-	-		K	
187	417	Jl. Kapten F. Tendean	T.R.Barat	0,185	12,30	100,00				0,185	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
188	418	Jl. K.H. Agus Salim	T.R.Barat	0,750	7,00	100,00				0,750	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
189	419	Jl. Besse Kajuara	T.R.Barat	0,500	9,00	100,00				0,500	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
190	420	Jl. Letjen D.I Panjaitan	T.R.Barat	0,304	4,00	100,00				0,304	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
191	421	Jl. Andi Gappa	T.R.Barat	0,150	3,00	100,00				-	-	-	-	0,15	100,00	-	-		K	
192	422	Jl. A. Maddepongeng	T.R.Barat	0,146	6,00	100,00				0,146	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
193	423	Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri	T.R.Barat	1,345	6,00	100,00				1,345	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
194	424	Jl. Irian	T.R.Barat	0,470	4,00	100,00				0,470	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
195	425	Jl. Kalimantan	T.R.Barat	0,546	4,00	100,00				0,546	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
196	426	Jl. Buton	T.R.Barat	0,245	4,00	100,00				0,245	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
197	427	Jl. Seram	T.R.Barat	0,278	3,50	100,00				0,278	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
198	428	Jl. Gunung Kimibalu	T.R.Barat	2,108	4,00	100,00				2,108	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
199	429	Jl. Rambutan	T.R.Barat	0,140	8,00	100,00				0,140	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
200	430	Jl. Langsat	T.R.Barat	0,875	8,00	100,00				0,875	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
201	431	Jl. Nenas	T.R.Barat	0,195	4,00	100,00				0,195	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
202	432	Jl. Pisang	T.R.Barat	0,350	4,00	100,00				0,350	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
203	433	Jl. Pisang Baru	T.R.Barat	0,700	4,00	100,00				0,700	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
204	434	Jl. Durian	T.R.Barat	0,525	8,00	100,00				0,525	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
205	435	Jl. Manggis	T.R.Barat	0,249	4,00	100,00				-	-	-	-	0,25	100,00	-	-		K	
206	436	Jl. Jambu	T.R.Barat	0,164	4,00	100,00				-	-	-	-	0,16	100,00	-	-		K	
207	437	Jl. Mangga	T.R.Barat	0,425	7,00	100,00				-	-	-	-	0,43	100,00	-	-		K	
208	438	Jl. Pepaya	T.R.Barat	0,446	7,00	100,00				0,046	10,31	-	-	0,40	89,69	-	-		K	
209	439	Jl. Salak	T.R.Barat	0,711	7,00	100,00				0,711	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
210	440	Jl. Majang	T.R.Barat	2,620	4,50	100,00				2,620	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
211	441	Jl. Mekar	T.R.Barat	0,328	4,50	100,00				-	-	-	-	-	-	0,33	100,00		K	
<b>Sub Jumlah</b>				<b>15,769</b>		<b>15,77</b>				<b>88,01</b>				<b>9,91</b>		<b>2,08</b>				

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
TAHUN : 2019

DD - 1

Hal. 10 dari 13

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan	
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			N/P/K	Ket
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
212	442	Jl. Husain Jeddawi	T.R.Barat	0,708	7,00	100,00				-	-	-	-	0,71	100,00	-	-		K	
213	443	Jl. Husain Jeddawi baru	T.R.Barat	0,500	4,00	100,00				-	-	-	-	0,50	100,00	-	-		K	
214	444	Jln.Stadion	T.R.Barat	0,750	4,00	100,00				0,550	73,33	0,20	26,67	-	-	-	-		K	
215	445	Jl.Reformasi	T.R.Barat	0,850	8,00	100,00				0,850	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
216	446	Jl.Perintis	T.R.Barat	1,300	18,00	100,00				0,525	40,38	0,78	59,62	-	-	-	-		K	
217	447	Jl.Komplex Pasar Palikka	T.R.Barat	3,060	4,00	100,00				-	-	-	-	2,25	73,43	0,81	26,57		K	
218	448	Jl.Lapawawoi KR.Sigeri Dalam	T.R.Barat	0,604	4,00	100,00				0,604	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
219	449	Jl. Nias	T.R.Barat	0,241	4,00	100,00				0,241	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
220	450	Jl. Bali	T.R.Barat	0,240	4,00	100,00				0,240	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
221	451	Jl. Ternate	T.R.Barat	0,268	4,00	100,00				0,268	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
222	452	Jl. Timor	T.R.Barat	0,260	4,00	100,00				0,260	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
223	453	Jl. Madura	T.R.Barat	0,178	3,00	100,00				-	-	-	-	-	-	0,18	100,00		K	
224	454	Jl. Flores	T.R.Barat	0,331	3,00	100,00				0,331	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
225	455	Jl. Bangka	T.R.Barat	0,140	3,00	100,00				0,140	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
226	456	Jl. Sumba	T.R.Barat	0,095	5,00	100,00				-	-	0,10	100,00	-	-	-	-		K	
227	457	Jl. Sangir	T.R.Barat	0,080	4,00	100,00				0,080	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
228	458	Jl.Sulawesi	T.R.Barat	0,460	4,00	100,00				0,460	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
229	459	Biru-Pattiro Bajo	T.Riattang/Sibulue/Barebbo	11,300	4,00	100,00				8,300	73,45	2,00	17,70	1,00	8,85	-	-		K	
230	460	Bukaka-Cempalagi	T.Riattang/Awangpone	12,000	4,00	100,00				12,000	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
231	461	Biru-Kampung Baru	T.Riattang-Barebbo	1,447	4,00	100,00				-	-	-	-	1,45	100,00	-	-		K	
232	462	Lacokkong - Coppomeru	T.Riattang	0,560	4,00	100,00				-	-	-	-	-	-	0,56	100,00		K	
233	463	Pallingoreng-Tirong	T.Riattang-T.R.Barat	5,550	4,00	100,00				3,113	56,09	-	-	1,34	24,20	1,09	19,71		K	
234	464	Jl. Petta PonggawaE	T.Riattang	0,290	12,00	100,00				0,290	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
235	465	Jl. Merdeka	T.Riattang	0,150	5,00	100,00				0,150	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
236	466	Jl. Budi Utomo	T.Riattang	0,100	4,00	100,00				0,100	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
237	467	Jl. Orde Baru	T.Riattang	0,394	6,00	100,00				0,394	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
238	468	Jl. Kawerang	T.Riattang	0,398	7,00	100,00				0,398	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
239	469	Jl. Letjen Sukawati	T.Riattang/T.R.Barat	1,496	7,70	100,00				1,496	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
240	470	Jl. Andi Mangenre Pt. Nompo	T.Riattang	0,434	4,00	100,00				-	-	-	-	0,43	100,00	-	-		K	
241	471	Jl. A. Mappelawa Petta Teppo	T.Riattang	0,350	3,00	100,00				0,350	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
242	472	Jl. Jend.Sudirman	T.Riattang	2,450	8,00	100,00				2,450	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
243	473	Jl. Jend A. Yani	T.Riattang	2,070	10,00	100,00				2,070	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
<b>Sub Jumlah</b>				<b>49,054</b>		<b>49,05</b>				<b>72,07</b>		<b>6,26</b>		<b>15,65</b>		<b>5,39</b>				

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN

DD - 1

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

TAHUN : 2019

Hal. 11 dari 13

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan		
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			N/P/K	Ket	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
244	474	Jl. Major (L) S.Dg. Mangatta	T.Riattang	0,402	3,50	100,00				-	-	-	-	0,40	100,00		-			K	
245	475	Jl. Andi Mandapi	T.Riattang	0,148	3,50	100,00				-	-	-	-	0,15	100,00		-			K	
246	476	Jl. Mayjen Abd. Azis Bustan	T.Riattang	0,140	3,50	100,00				-	-	-	-	0,14	100,00		-			K	
247	477	Jl. Kol. Polisi Andi Dadi	T.Riattang	0,702	3,50	100,00				-	-	-	-	0,70	100,00		-			K	
248	478	Jl. A. Page Arung Labuaja	T.Riattang	0,177	3,40	100,00				0,081	45,76	-	-	-	-	0,10	54,24			K	
249	479	Jl. A. Pasinringi	T.Riattang	0,300	3,00	100,00				-	-	-	-	0,30	100,00		-			K	
250	480	Jl.A. Palesangi	T.Riattang	0,260	3,00	100,00				-	-	-	-	-	-	0,26	100,00			K	
251	481	Jl. A. Pananrangi	T.Riattang	0,208	3,00	100,00				0,208	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
252	482	Jl. K. H. Adam	T.Riattang	0,532	3,50	100,00				0,532	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
253	483	Jl. K. H. Sulaiman	T.Riattang	0,538	3,00	100,00				-	-	-	-	0,54	100,00	-	-			K	
254	484	Jl. K. H. Abu Hamid 1	T.Riattang	2,000	4,00	100,00				1,500	75,00	0,50	25,00	-	-	-	-			K	
255	485	Jl. A. Ali Petta Cenrana	T.Riattang	0,454	2,50	100,00				0,454	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
256	486	Jl. Latenri Tappu	T.Riattang	0,341	4,00	100,00				0,341	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
257	487	Jl. Lapatau	T.Riattang	0,400	5,00	100,00				0,400	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
258	488	Jl. Laummasa	T.Riattang	0,523	3,00	100,00				0,523	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
259	489	Jl. Lamaddaremmeng	T.Riattang	0,167	4,00	100,00				0,167	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
260	490	Jl. Laparenrengi	T.Riattang	0,165	4,00	100,00				0,165	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
261	491	Jl. Lamappalilu	T.Riattang	0,150	3,00	100,00				0,150	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
262	492	Jl. Latenri Tatta	T.Riattang	0,270	6,00	100,00				0,270	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
263	493	Jl. Kajao Laliddong	T.Riattang	0,245	4,00	100,00				0,245	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
264	494	Jl. Andi Pangerang Pettarani	T.Riattang	0,809	4,00	100,00				0,809	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
265	495	Jl. Imaniratu	T.Riattang	0,251	3,00	100,00				0,251	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
266	496	Jl. K. H. Ramlil	T.Riattang	0,289	4,00	100,00				0,289	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
267	497	Jl. Batari Toja	T.Riattang	0,297	4,00	100,00				0,297	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
268	498	Jl. Andi Amir	T.Riattang	0,300	4,00	100,00				0,136	45,33	-	-	0,16	54,67	-	-			K	
269	499	Jl. A. Sulolipu	T.Riattang	0,475	4,00	100,00				-	-	-	-	0,48	100,00	-	-			K	
270	500	Jl. A. Sambaloge	T.Riattang	1,522	4,00	100,00				1,522	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
271	501	Jl. Bau Massepe	T.Riattang	0,190	2,50	100,00				0,190	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
272	502	Jl. Lanto Dg. Pasewang	T.Riattang	1,380	7,00	100,00				1,380	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
273	503	Jl. M.H.Thamrin	T.Riattang	1,550	8,00	100,00				1,550	100,00	-	-	-	-	-	-			K	
274	504	Jl. Veteran	T.Riattang	0,860	6,00	100,00				0,430	50,00	-	-	0,43	50,00	-	-			K	
<b>Sub Jumlah</b>				<b>16,045</b>						<b>16,05</b>											
											<b>74,10</b>			<b>3,12</b>		<b>20,56</b>		<b>2,22</b>			

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
TAHUN : 2019

DD-4

Hal. 12 dari 13

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan	
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			N/P/K	Ket
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
275	505	Jl. Abu Dg. Pasolong	T.Riattang	2,150	6,00	100,00				2,150	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
276	506	Jl. A. Malla Arung Manajeng	T.Riattang	0,700	7,00	100,00				0,700	100,00								K	
277	507	Jl. ManurungE	T.Riattang	0,375	4,00	100,00				0,375	100,00								K	
278	508	Jl. Beringin	T.Riattang	0,210	9,00	100,00				0,210	100,00								K	
279	509	Jl. Tanah BangkalaE	T.Riattang	0,100	5,00	100,00				0,100	100,00								K	
280	510	Jl. Mesjid	T.Riattang	0,411	6,00	100,00				0,411	100,00								K	
281	511	Jl. Makmur	T.Riattang	0,927	6,00	100,00				0,927	100,00								K	
282	512	Jl. Bhayangkara	T.Riattang	0,632	5,00	100,00				0,632	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
283	513	Jl. Andalas	T.Riattang	0,708	4,00	100,00				0,708	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
284	514	Jl. Sungai Citarum	T.Riattang	0,455	4,00	100,00				0,455	100,00								K	
285	515	Jl.Sungai Tangka	T.Riattang	0,220	4,00	100,00				0,220	100,00								K	
286	516	Jl. Sungai WalanaE	T.Riattang	0,280	4,00	100,00				0,280	100,00								K	
287	517	Jl.Sungai Musi	T.Riattang	3,850	5,00	100,00				-	-	3,85	100,00	-	-	-	-		K	
288	518	Jl.Sungai Asahan	T.Riattang	0,500	3,50	100,00				0,500	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
289	519	Jl.Sungai Limboto	T.Riattang	1,445	4,00	100,00				1,445	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
290	520	Jl. Sungai Cerekang	T.Riattang	0,152	3,50	100,00				0,152	100,00	-	-	-	-	-	-		K	
291	521	Jl. Sungai Jenne Berang	T.Riattang	0,356	3,50	100,00				0,356	100,00								K	
292	522	Jl. Sungai Mahakam	T.Riattang	0,500	3,50	100,00				0,500	100,00								K	
293	523	Jl. Sungai Cenrana	T.Riattang	0,325	4,00	100,00				0,325	100,00								K	
294	524	Jl. Sungai Saddang	T.Riattang	0,355	4,00	100,00				0,355	100,00								K	
295	525	Jl. Sungai Barito	T.Riattang	0,176	3,50	100,00				0,176	100,00								K	
296	526	Jl. Sungai Serayu	T.Riattang	0,100	4,00	100,00				0,100	100,00								K	
297	527	Jl. Sungai Kapuas	T.Riattang	0,387	5,00	100,00				0,387	100,00								K	
298	528	Jl. Gunung Merapi	T.Riattang	0,150	4,00	100,00				0,150	100,00								K	
299	529	Jl. Gunung Latimojong	T.Riattang	0,282	3,50	100,00				0,282	100,00								K	
300	530	Jl. Gunung Lompobattang	T.Riattang	0,150	3,50	100,00				0,150	100,00								K	
301	531	Jl. Gunung Bawakaraeng	T.Riattang	0,552	3,00	100,00				0,552	100,00								K	
302	532	Jl. Gunung Jaya Wijaya	T.Riattang	0,409	7,80	100,00				0,409	100,00								K	
303	533	Jl. Gunung Semeru	T.Riattang	0,392	5,00	100,00				0,392	100,00								K	
304	534	Jl. Gunung Klabat	T.Riattang	0,360	7,20	100,00				0,360	100,00								K	
305	535	Jl. Gunung Kerinci	T.Riattang	1,450	3,00	100,00				0,323	22,28			0,12	8,41	1,01	69,31		K	
306	536	Jl.Gunung Rinjani	T.Riattang	0,750	3,00	100,00				0,089	11,87					0,66	88,13		K	
307	537	Jl. Rusa	T.Riattang	0,370	3,50	100,00				0,370	100,00								K	
308	538	Jl. Anoa	T.Riattang	0,513	3,50	100,00				0,513	100,00								K	
309	539	Jl. Tupai	T.Riattang	0,250	2,50	100,00				0,068	27,20			0,18	72,80				K	
		<b>Sub Jumlah</b>		<b>20,942</b>		<b>20,94</b>				<b>72,21</b>		<b>18,38</b>		<b>1,45</b>		<b>7,96</b>				

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN

DD - 1

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN : BONE  
TAHUN : 2019

Hal. 13 dari 13

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR	Akses ke Jalan N/P/K	Ket		
						Aspal / Penstrasi Macadam	Perkerasan Beton	Telford / LPB/LPA/CTB	Tanah/ Belum Tembus	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat						
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
310	540	Jl. Onta	T.Riattang	0,290	5,00	100,00		-		0,290	100,00									K		
311	541	Jl. Badak	T.Riattang	0,190	5,00	100,00		-		0,190	100,00									K		
312	542	Jl. Macan	T.Riattang	0,297	4,00	100,00		-		0,297	100,00									K		
313	543	Jl. Kancil	T.Riattang	0,250	3,50	100,00		-		0,250	100,00									K		
314	544	Jl.Srigala	T.Riattang	0,348	3,50	100,00		-		0,348	100,00									K		
315	545	Jl.Bumi Biru	T.Riattang	0,385	4,00	100,00		-		0,385	100,00									K		
316	546	Waetuo-Lamurukung	T.R.Timur/Awangpone/T.Siattinge	11,421	4,00	100,00		-		11,421	100,00									K		
317	547	BajoE-Kading	T.R.Timur-Barebbo	4,378	4,00	100,00		-		4,378	100,00									K		
318	548	Cellu-Toro	T.R.Timur	2,150	4,00	50,00		50,00		0,626	29,12					1,524	70,88			K		
319	549	Tanggul BajoE-Cappaujung	T.R.Timur	17,500	4,00	-		5,00	95,00	1,73	9,86					15,77	90,14			K		
320	550	Waetuo-Cempalagi	T.R.Timur-Awangpone	1,726	4,00	42,00		58,00		1,000	57,94			0,73	42,06					K		
321	551	Maloi-DareE	T.R.Timur	3,050	4,00	100,00		-		1,500	49,18					1,55	50,82			K		
322	552	Cellu-Cellu Rilau	T.R.Timur	2,680	4,00	-		100,00				1,50	55,97	1,18	44,03					K		
323	553	Kompleks BTN. LonraE	T.R.Timur	1,344	4,00	100,00		-		1,344	100,00									K		
324	554	LonraE-Bene	T.R.Timur	1,568	4,00	100,00		-		1,568	100,00									K		
325	555	Rompe-Tenge	T.R.Timur	1,900	4,00	100,00		-		1,900	100,00									K		
326	556	Cellu Rilau-Cellu Riaja	T.R.Timur	1,200	4,00	20,00		80,00		0,219	18,25					0,98	81,75			K		
327	557	BajoE-Toro	T.R.Timur	3,675	4,00	100,00		-		1,832	49,85					1,84	50,15			K		
328	558	Jl. Kesehatan	T.R.Timur	0,523	4,00	100,00		-						0,52	100,00					K		
329	559	Jl. Sungai Pareman	T.R.Timur	3,026	4,00	100,00		-		3,026	100,00									K		
330	560	Jl. Sungai Berantas	T.R.Timur	2,111	8,00	100,00		-		1,500	71,06	0,31	14,73	0,30	14,21					K		
331	561	Jl. A.Masakirang	T.R.Timur	2,500	4,00	100,00		-		2,500	100,00									K		
332	562	Jl. A. Celleng	T.R.Timur	2,050	8,00	100,00		-		2,050	100,00									K		
333	563	Panyula-Palette	T.R.Timur	8,454	4,00	100,00		-		8,454	100,00									K		
334	564	Taccipi-Sumpalabbu-Koppe	Ulaweng/Bengo	18,000	4,00	100,00		-		18,000	100,00									K		
335	565	Tobunne- Massangkae	Kajuara	8,000	4,00			100,00		4,000	50,00	1,50	18,75	1,50	18,75	1,00	12,50			K		
336	566	Corawali-Melle	Barebbo	5,000	4,00	100,00		-								5,00	100,00			K		
337	567	Jalan Kol.A.S.Suaib	Tanete Riattang	0,430	4,00	100,00		-		0,430	100,00									K		
338	568	Paccing - Cakke Bone	Awangpone	6,000	4,00			100,00		2,000	33,33	1,00	16,67	2,00	33,33	1,00	16,67			K		
<b>Sub Jumlah</b>				<b>110,45</b>						<b>73,23</b>	<b>20,59</b>	<b>16,63</b>	<b>71,23</b>		<b>4,31</b>		<b>6,23</b>	<b>28,67</b>				
<b>A.Total Panjang Jalan (Km)</b>				<b>1.559,514</b>						<b>819,30</b>	<b>650,00</b>	<b>40,55</b>										
<b>B. Persentase Jalan (%)</b>				<b>100,026</b>							<b>575,081</b>	<b>36,88</b>	<b>363,727</b>	<b>23,32</b>	<b>172,173</b>	<b>11,04</b>	<b>448,93</b>	<b>28,79</b>				

Keterangan :  
1. N : Jalan Nasional  
2. P : Jalan Propinsi  
3. K : Jalan Kabupaten

Kondisi Mantap = Baik + Sedang = **60,20 %**  
Panjang jalan kabupaten dengan permukaan aspal : **819,30 Km**  
Panjang Jalan Kabupaten dengan permukaan Telford/kerikil : **650,00 Km**  
Panjang Jalan Kabupaten dengan permukaan tanah : **40,55 Km**  
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap : **938,81 Km**

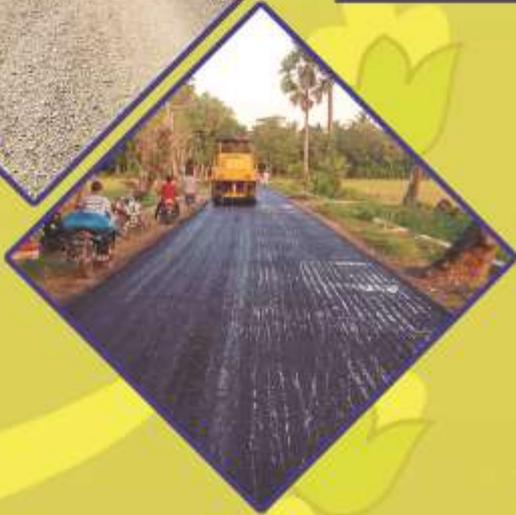
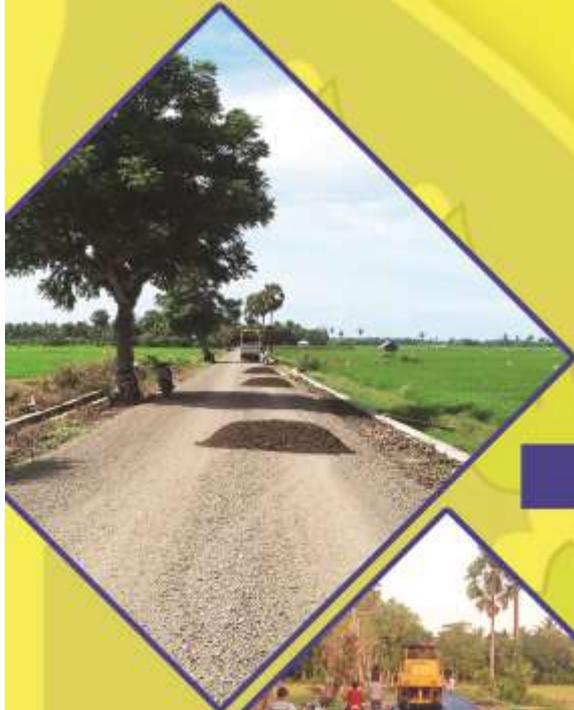
621,11

An. KEPALA DINAS PU & PENATAAN RUANG KAB. BONE  
PLH. KABID BINA TEKNIK & JASA KONSTRUKSI

KASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

JUMRAN, ST, MT  
Nip. 19740405 200502 1 001

A. TENRI MULANA ILYAS, ST, M.SP  
Nip. 19830225 200904 2 002



EN BONE

[www.pu.bone.go.id](http://www.pu.bone.go.id)

Jalan Laksamana Yos Sudarso - Watampone, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan  
Telpon : (0481) 26907 - Email : pu@bone.go.id